

RENCANA KERJA TAHUN 2023



**DISKOP
UKM**
PROV JATIM

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TIMUR

0025

Plan

- 1.
- 2.
- 3.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. LATAR BELAKANG	3
1.2. LANDASAN HUKUM	4
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	8
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	9
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	9
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	16
2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	22
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	22
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	35
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	48
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	48
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH	52
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	64
4.1 PRIORITAS PERANGKAT DAERAH YANG MENDUKUNG PRIORITAS PROVINSI	64
4.2 PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	67
BAB V PENUTUP	69
5.1 KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN	69
5.2 RENCANA TINDAK LANJUT	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana kerja perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun. Rencana kerja tahun 2023 ini merupakan penjabaran rencana strategis (renstra) perubahan tahun 2019 - 2024. Berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017, renja perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra perangkat daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan rencana kerja dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan rencana kerja. Adapun dalam tahap penyusunan ini berdasar pada RKPD dan rencana strategis (renstra) perubahan tahun 2019 - 2024 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur.

Dalam penyusunan renja tahun 2023, telah dilakukan analisis evaluasi capaian pada tahun 2021 serta perkiraan capaian pada tahun berjalan 2022. Selain itu, juga telah melalui proses perencanaan dengan memperhatikan isu-isu strategis pemberdayaan koperasi dan UKM, baik di Jawa Timur maupun nasional.

Koperasi dan UMKM di Jawa Timur memegang peranan yang sangat penting dan menjadi basis pembangunan ekonomi kerakyatan. Kondisi ini ditunjukkan melalui jumlah koperasi yang mencapai lebih dari 22 ribu unit dan UMKM sebanyak 9,78 juta. Jumlah koperasi dan UMKM tersebut dapat menjadi potensi sekaligus ancaman bagi perekonomian Jawa Timur. Dikatakan demikian karena berkembang atau tidaknya koperasi dan UMKM tersebut akan berdampak pada perekonomian Jawa Timur dan kesejahteraan masyarakat pada khususnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Koperasi dan UKM melihat besarnya jumlah koperasi dan UMKM ini sebagai peluang untuk memperkuat perekonomian dengan berbasis pada ekonomi kerakyatan. Selain itu, dengan terjadinya pandemic covid – 19 berpengaruh pada perekonomian dan mendorong terjadinya perubahan – perubahan pada masyarakat sehingga juga berdampak pada perubahan pola bisnis pada koperasi dan UMKM.

Strategi pemberdayaan koperasi dan UMKM merupakan hal yang sangat penting dengan berbagai isu strategis dan tantangan kedepan yang lebih kompleks. Tantangan kedepan diantaranya adalah tantangan digitalisasi di hampir semua aspek kehidupan, yang tentu saja akan berpengaruh terhadap koperasi dan UMKM. Sehingga baik koperasi maupun UMKM harus mampu untuk berkompetisi dengan cara meningkatkan daya saingnya. Adapun peningkatan daya saing itu sendiri, selain dilihat dari aspek harga, juga dilihat dari sisi kualitas dan kreatifitas. Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan daya saing tersebut, maka Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur fokus pada peningkatan produksi, pembiayaan, pemasaran, maupun peningkatan kualitas kelembagaan dan SDM pengelola koperasi UKM.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan rencana kerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur tahun 2023 yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
8. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 81);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024;
26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Seri E;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 102);
29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Jawa Timur;

30. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur;
31. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan rencana kerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur tahun 2023 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan untuk kurun waktu satu tahun yaitu tahun 2023, yang merupakan penjabaran Perubahan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur tahun 2019 - 2024 dan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024. Sedangkan tujuannya adalah sebagai gambaran apa yang akan dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di Jawa Timur.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan dokumen rencana kerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Bab I berisi pendahuluan terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan;

Bab II merupakan hasil evaluasi renja, baik yang telah dilaksanakan hingga tahun 2021 maupun rencana pencapaian tahun 2022;

Bab III Tujuan dan sasaran dari rencana kerja Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur tahun 2023;

Bab IV berisi Rencana kerja dan pendanaan;

Bab V Penutup.

BAB II

HASIL EVALUASI

RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2021

Pada bagian ini akan dibahas mengenai evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian atas Rencana Strategis tahun 2019 - 2024. Selain itu akan disajikan pula analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi serta Review terhadap RKPD.

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah dilakukan sebagai bentuk kontrol dan evaluasi kinerja instansi pemerintah sehingga dapat diketahui faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam pencapaian kinerja yang telah direncanakan untuk tahun 2019-2024. Adapun evaluasi renja tahun 2021 didasarkan dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2021 dan perkiraan pencapaian Renstra Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur sampai dengan tahun 2022 disajikan melalui tabel 2.1. di bawah ini :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Perkiraan Realisasi Capaian Renstra

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
			(Akhir Periode Renstra PD)		s.d. Renja PD tahun lalu 2021		tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		I		II		III		IV		Renja PD yang dievaluasi Tahun 2022		tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Renstra PD s/d Tahun 2022 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	100,00 %		0,00		100,00 %	39.467.667.456	0,00	6.300.841.140	0,00	9.344.296.820	0,00	0,00	0,00	0,00	15.645.137.960	39.467.667.456				
		Persentase realisasi anggaran	100,00 %		0,00		100,00 %		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00						
		Indeks profesionalitas ASN	75,00 %		0,00		73,00 %		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00						
2.17.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran yang disusun	16,00 Dokumen		0,00		4,00 Dokumen	1.858.890.000	0,00	295.683.287	0,00	359.123.941	0,00	0,00	0,00	0,00	654.807.228	1.858.890.000				
2.17.01.1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	7,00 dokumen		0,00		7,00 dokumen	716.745.022	0,00	175.673.387	0,00	179.972.447	0,00	0,00	0,00	0,00	355.645.834	716.745.022				
2.17.01.1.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA	1,00 Dokumen		0,00		1,00 Dokumen	7.563.442	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.17.01.1.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	1,00 Dokumen		0,00		1,00 Dokumen	7.563.442	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.17.01.1.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	1,00 Dokumen		0,00		1,00 Dokumen	4.063.442	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.17.01.1.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan	1,00 Dokumen		0,00		1,00 Dokumen	4.063.442	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.17.01.1.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja	5,00 Dokumen		0,00		5,00 Dokumen	1.089.990.210	0,00	120.009.900	0,00	172.587.994	0,00	0,00	0,00	0,00	292.597.894	1.089.990.210				
2.17.01.1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	4,00 Dokumen		0,00		4,00 Dokumen	28.901.000	1,00		0,00	6.563.500	0,00	0,00	0,00	1,00	6.563.500	28.901.000				
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	3,00 Dokumen		0,00		1,00 Dokumen	26.408.928.000	0,00	3.891.185.406	0,00	6.182.365.152	0,00	0,00	0,00	0,00	10.073.550.558	26.408.928.000				
		Jumlah Dokumen Keuangan yang Disusun	12,00 Dokumen		0,00		0,00 Dokumen		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.17.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	12,00 Laporan		0,00		12,00 Laporan	25.110.656.000	3,00	3.653.838.746	3,00	5.830.358.273	0,00	0,00	0,00	6,00	9.484.197.019	25.110.656.000				
2.17.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12,00 Laporan		0,00		12,00 Laporan	583.860.000	3,00	133.235.000	3,00	133.824.000	0,00	0,00	0,00	6,00	267.059.000	583.860.000				
2.17.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan verifikasi penatausahaan	12,00 Laporan		0,00		12,00 Laporan	634.152.268	3,00	97.657.810	3,00	213.529.099	0,00	0,00	0,00	6,00	311.186.909	634.152.268				
2.17.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan akuntansi perangkat daerah	12,00 Laporan		0,00		12,00 Laporan	7.509.478	3,00	1.811.400	3,00	200.000	0,00	0,00	0,00	6,00	2.011.400	7.509.478				
2.17.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen keuangan SKPD	2,00 dokumen		0,00		2,00 dokumen	7.022.223	1,00	1.594.850	0,00	718.000	0,00	0,00	0,00	1,00	2.312.850	7.022.223				
2.17.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan atas LHP	Jumlah dokumen tanggapan atas LHP	1,00 Dokumen		0,00		1,00 Dokumen	44.327.145	0,00	1.050.000	0,00	2.535.780	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585.780	44.327.145				
2.17.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	12,00 Laporan		0,00		12,00 Laporan	17.201.847	3,00	1.997.600	3,00	1.200.000	0,00	0,00	0,00	6,00	3.197.600	17.201.847				
2.17.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis	1,00 Laporan		0,00		1,00 Laporan	4.199.039	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00						
2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	8,00 Dokumen		0,00		2,00 Dokumen	1.888.817.749	0,00	439.703.527	0,00	474.264.696	0,00	0,00	0,00	0,00	913.868.223	1.888.817.749				
2.17.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan prasarana yg terpenuhi	1,00 Laporan		0,00		1,00 Laporan	167.903.399	0,00	66.212.883	0,00	800.000	0,00	0,00	0,00	0,00	67.012.883	167.903.399				

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
			(Akhir Periode Renstra PD)		s.d. Renja PD tahun lalu 2021		tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		I		II		III		IV		Renja PD yang dievaluasi Tahun 2022		tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Renstra PD s/d Tahun 2022 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
2.17.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	2.00 Paket		0,00		2.00 Paket	259.617.750	0,00	23.809.500	0,00	14.233.530	0,00	0,00	0,00	0,00	38.043.030		259.617.750			
2.17.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian	12.00 Dokumen		0,00		12.00 Dokumen	970.501.600	3,00	145.838.557	3,00	265.519.830	0,00	0,00	6,00	411.358.387		970.501.600				
2.17.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Data Pegawai	1.00 Laporan		0,00		1.00 Laporan	142.850.000	0,00	78.134.044	0,00	40.391.336	0,00	0,00	0,00	118.525.380		142.850.000				
2.17.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.00 Dokumen		0,00		1.00 Dokumen	347.945.000	0,00	125.708.543	0,00	153.320.000	0,00	0,00	0,00	279.028.543		347.945.000				
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	3.00 Dokumen		0,00		1.00 Dokumen	3.548.846.023	0,00	652.741.265	0,00	991.010.609	0,00	0,00	0,00	1.843.751.874		3.548.846.023				
		Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	2.00 Dokumen		0,00		0.00 Dokumen		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00							
2.17.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket pengadaan	1.00 Paket		0,00		1.00 Paket	26.137.095	0,00	64.000	0,00	5.311.600	0,00	0,00	0,00	5.375.600		26.137.095				
2.17.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket pengadaan	2.00 Paket		0,00		2.00 Paket	818.984.155	0,00	288.356.525	0,00	200.147.143	0,00	0,00	0,00	488.503.668		818.984.155				
		Jumlah Paket Pengadaan	2.00 Paket		0,00		2.00 Paket		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			818.984.155				
2.17.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket pengadaan	1.00 Paket		0,00		1.00 Paket	293.402.999	0,00	29.067.840	0,00	186.944.930	0,00	0,00	0,00	216.012.770		293.402.999				
2.17.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket pengadaan	1.00 Paket		0,00		1.00 Paket	268.922.424	0,00	11.942.800	0,00	49.043.690	0,00	0,00	0,00	60.986.490		268.922.424				
2.17.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah paket pengadaan	1.00 Paket		0,00		1.00 Paket	19.899.600	0,00	4.245.000	0,00	4.245.000	0,00	0,00	0,00	8.490.000		19.899.600				
2.17.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	jumlah paket pengadaan	1.00 Paket		0,00		1.00 Paket	113.763.250	0,00	330.600	0,00	41.565.100	0,00	0,00	0,00	41.895.700		113.763.250				
2.17.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	jumlah paket pengadaan	1.00 Paket		0,00		1.00 Paket	234.130.500	0,00	22.702.000	0,00	120.274.000	0,00	0,00	0,00	142.976.000		234.130.500				
2.17.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	1.00 Laporan		0,00		1.00 Laporan	1.773.606.000	0,00	296.032.500	0,00	383.479.146	0,00	0,00	0,00	679.511.646		1.773.606.000				
2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	3.00 Dokumen		0,00		1.00 Dokumen	282.650.000	0,00	274.553.632	0,00		0,00	0,00	0,00	274.553.632		282.650.000				
		Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	2.00 Dokumen		0,00		0.00 Dokumen		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00							
2.17.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya yang diadakan	jumlah aset tetap lainnya yang diadakan	1.00 Paket		0,00		1.00 Paket	282.650.000	0,00	274.553.632	0,00		0,00	0,00	0,00	274.553.632		282.650.000				
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.00 Dokumen		0,00		1.00 Dokumen	4.042.159.908	0,00	617.729.760	0,00	948.784.143	0,00	0,00	0,00	1.566.513.903		4.042.159.908				
		Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	2.00 Dokumen		0,00		0.00 Dokumen		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00							
2.17.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman dokumen	1.00 Paket		0,00		1.00 Paket	10.000.000	0,00	1.000.000	0,00	2.000.000	0,00	0,00	0,00	3.000.000		10.000.000				
2.17.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.00 Bulan		0,00		12.00 Bulan	1.064.505.146	3,00	205.988.450	3,00	218.082.594	0,00	0,00	6,00	424.071.044		1.064.505.146				
2.17.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket pelaksanaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.00 Paket		0,00		1.00 Paket	108.951.000	0,00		0,00	25.907.992	0,00	0,00	0,00	25.907.992		108.951.000				
2.17.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah paket pelayanan umum Kantor	2.00 Paket		0,00		2.00 Paket	2.858.703.762	0,00	410.741.310	0,00	702.793.557	0,00	0,00	0,00	1.113.534.867		2.858.703.762				
		Jumlah Jasa	2.00 paket		0,00		2.00 paket		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00							

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Renstra PD tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
			(Akhir Periode Renstra PD)		s.d. Renja PD tahun lalu 2021		tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		I		II		III		IV		Renja PD yang dievaluasi Tahun 2022		tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Renstra PD s/d Tahun 2022 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	2.00 Dokumen	0,00	0,00	1.00 Dokumen	1.437.375.776	0,00	129.244.263	0,00	388.748.279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.992.542	1.437.375.776				
		Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawalan	2.00 Dokumen	0,00	0,00	0.00 Dokumen		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.17.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa	1.00 Paket	0,00	0,00	1.00 Paket	217.100.000	0,00	43.160.308	0,00	42.222.469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.382.777	217.100.000				
2.17.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa	2.00 Paket	0,00	0,00	2.00 Paket	230.842.926	0,00	46.463.263	0,00	52.586.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.049.370	230.842.926				
		Jumlah Jasa	2.00 Paket	0,00	0,00	2.00 Paket		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.17.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	2.00 Paket	0,00	0,00	2.00 Paket	291.080.000	0,00	15.740.000	0,00	41.313.450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.053.450	291.080.000				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	2.00 Paket	0,00	0,00	2.00 Paket		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.17.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	2.00 Paket	0,00	0,00	2.00 Paket	371.500.000	0,00	23.880.692	0,00	232.622.253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.502.945	371.500.000				
2.17.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarpras Gedung yang dipelihara	1.00 paket	0,00	0,00	1.00 paket	326.852.850	0,00		0,00	20.004.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.004.000	326.852.850				
		Jumlah Sarpras Gedung yang dipelihara	1.00 paket	0,00	0,00	1.00 paket		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Indeks Kepuasan Pelayanan Izin USP dan Izin Pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas USP	88.00 %	70,77	70,77	86.00 %	1.200.000.000	0,00	107.767.750	0,00	248.248.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.015.751	1.200.000.000				
		Persentase Koperasi Berkinerja Baik	70.76 %	0,00	0,00	0.00 %		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah penerbitan Izin USP - Koperasi	105.00 Unit	270,00	270,00	150.00 Unit	600.000.000	30,00	58.703.500	120,00	162.733.541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	221.437.041	600.000.000			
		Jumlah K-UKM yang dikuatkan Penguatan Organisasi dan Tatalaksana	270.00 Unit	0,00	0,00	0.00 Unit		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.17.02.1.01.01	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang difasilitasi perijinan usaha simpan pinjam	150.00 unit	270,00	270,00	150.00 unit	600.000.000	0,00	58.703.500	120,00	162.733.541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	221.437.041	600.000.000			
2.17.02.1.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah K-UKM yang dikuatkan Penguatan Organisasi dan Tatalaksana	270.00 Unit	0,00	0,00	0.00 Unit	600.000.000	0,00	49.064.250	0,00	85.514.460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.578.710	600.000.000				
		Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam koperasi	100.00 %	0,00	0,00	100.00 %		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.17.02.1.02.01	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang difasilitasi perijinan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas	300.00 unit	0,00	0,00	300.00 unit	600.000.000	0,00	49.064.250	120,00	85.514.460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.578.710	600.000.000				
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Berkualitas	64.00 %	0,00	0,00	62.00 %	1.589.370.411	0,00	138.208.275	0,00	343.099.988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.308.263	1.589.370.411				

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Renstra PD tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran			
			(outcome) / Kegiatan (output)		(Akhir Periode Renstra PD)		s.d. Renja PD tahun lalu 2021		tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		I		II		III		IV		Renja PD yang dievaluasi Tahun 2022		tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Renstra PD s/d Tahun 2022 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		Persentase Koperasi Berkinerja Baik	70.76 %		0,00		0.00 %	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase pemeriksaan dan pengawasan koperasi	46.00 %		0,00		44.00 %	1.589.370.411	0,00	138.208.275	0,00	343.099.988	0,00	0,00		0,00		0,00	481.308.263		1.589.370.411			
		Jumlah KUKM yang dilakukan Pengawasan	200.00 Unit		0,00		0.00 Unit		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00			1.589.370.411			
2.17.03.1.01.01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Koperasi yang difasilitasi peningkatan akuntabilitas	250.00 unit		0,00		250.00 unit	1.589.370.411	0,00	138.208.275	0,00	343.099.988	0,00	0,00		0,00		0,00	481.308.263		1.589.370.411			
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi sehat	23.00 %		0,00		21.00 %	604.804.356	0,00	212.561.450	0,00	240.872.800	0,00	0,00		0,00		0,00	453.434.250		604.804.356			
		Persentase Koperasi Berkinerja Baik	70.76 %		0,00		0.00 %		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00						
2.17.04.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya	30.00 %		0,00		25.00 %	604.804.356	0,00	212.561.450	0,00	240.872.800	0,00	0,00		0,00		0,00	453.434.250		604.804.356			
		Jumlah KUKM yang dilakukan Pengawasan	200.00 Unit		0,00		0.00 Unit		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00			604.804.356			
2.17.04.1.01.01	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah Koperasi yang difasilitasi penilaian kesehatan	125.00 unit		200,00		125.00 unit	604.804.356	0,00	212.561.450	120,00	240.872.800	0,00	0,00		0,00		0,00	453.434.250		604.804.356			
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan	97.00 %		0,00		95.00 %	4.215.285.867	0,00	744.632.003	0,00	977.029.634	0,00	0,00		0,00		0,00	1.721.661.637		4.215.285.867			
		Persentase SDM K-UKM yang Bersertifikat	96.00 %		0,00		0.00 %		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00						
2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase jumlah pengelola koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian	33.00 %		0,00		31.00 %	3.156.251.487	0,00	672.654.595	1,00	907.060.472	0,00	0,00		0,00		1,00	1.579.715.067		3.156.251.487			
		Jumlah modul yang dihasilkan / diupdate	1.00 Modul		0,00		0.00 Modul		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00						
		Jumlah SDM Koperasi peserta pelatihan	200.00 Orang		0,00		0.00 Orang		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00						
		Jumlah SDM Koperasi yang ditingkatkan kapasitasnya	840.00 Orang		0,00		0.00 Orang		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00						
2.17.05.1.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah modul atau media pelatihan yang dikembangkan atau dihasilkan	2.00 unit		0,00		2.00 unit	3.156.251.487	0,00	672.654.595	0,00	907.060.472	0,00	0,00		0,00		0,00	1.579.715.067		3.156.251.487			
		Jumlah SDM Koperasi yang difasilitasi melalui pelatihan perkoperasian	150.00 Orang		0,00		100.00 Orang		0,00		50,00		0,00		0,00			50,00						
2.17.05.1.02	Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah SDM UKM yang ditingkatkan kapasitasnya	120.00 Orang		0,00		0.00 Orang	1.059.034.380	0,00	71.977.408	0,00	69.969.162	0,00	0,00		0,00		0,00	141.946.570		1.059.034.380			
2.17.05.1.02.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah SDM UKM yang ditingkatkan kapasitasnya	360.00 orang		0,00		360.00 orang	1.059.034.380	150,00	71.977.408	0,00	69.969.162	0,00	0,00		0,00		150,00	141.946.570		1.059.034.380			
		Jumlah SDM UKM yang ditingkatkan kapasitasnya	360.00 Orang		0,00		360.00 Orang		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00						
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang telah diberdayakan dan dilindungi	70.00 %		0,00		68.00 %	15.238.083.560	0,00	1.514.487.403	0,00	4.140.801.714	0,00	0,00		0,00		0,00	5.655.289.117		15.238.083.560			
		Persentase Koperasi Berkinerja Baik	70.76 %		0,00		0.00 %		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00						

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Renstra PD tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja Pada Triwulan PD								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran			
			(outcome) / Kegiatan (output)		(Akhir Periode Renstra PD)		s.d. Renja PD tahun lalu 2021		tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		I		II		III		IV		Renja PD yang dievaluasi Tahun 2022		tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Renstra PD s/d Tahun 2022 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		Persentase K-UKM yang berhasil mengakses pembiayaan	5.25 %		0,00		0,00 %		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00						
		Persentase peningkatan produksi Koperasi dan UKM yang dibina	2.00 %		0,00		0,00 %		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00						
2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	30.00 %		0,00		30.00 %	15.238.083.560	0,00	1.514.487.403	0,00	4.140.801.714	0,00		0,00		0,00	5.655.289.117			15.238.083.560			
		Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	26.00 %		0,00		22.00 %		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan	46.00 %		0,00		42.00 %		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan usaha	32.00 %		0,00		30.00 %		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
		Jumlah K-UKM yang difasilitasi dalam penyediaan informasi pemasaran dan kewirausahaan KUKM	120.00 Unit		0,00		0,00 Unit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
		Jumlah K-UKM yang dikuatkan Penguatan Organisasi dan Tatalaksana	270.00 Unit		0,00		0,00 Unit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
		Jumlah K-UKM Terakses Informasi Perkoperasian dan UKM	390.00 Unit		0,00		0,00 Unit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
		Jumlah K-UKM yang difasilitasi melalui pameran	120.00 Unit		0,00		0,00 Unit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
		Jumlah Koperasi yang mengakses permodalan lembaga keuangan perbankan	375.00 Unit		0,00		0,00 Unit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
		Jumlah K-UKM yang difasilitasi akses permodalan melalui lembaga keuangan non perbankan	100.00 Unit		0,00		0,00 Unit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
		Jumlah KSP/USP-Koperasi dan KSP-PS/USP-PS Koperasi yang dikuatkan usahanya	425.00 Unit		0,00		0,00 Unit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
		Jumlah KSPPS/USPPS Koperasi yang dikuatkan usaha syariahnya	375.00 Unit		0,00		0,00 Unit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
		Jumlah K-UKM yang ditingkatkan kualitas produksinya	250.00 Unit		0,00		0,00 Unit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
		Jumlah K-UKM yang direstrukturisasi usahanya	30.00 Unit		0,00		0,00 Unit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
2.17.06.1.01.01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Koperasi yang difasilitasi dalam penyediaan informasi pemasaran dan kewirausahaan	50.00 unit		0,00		50.00 unit	9.327.385.202	0,00	679.611.264	0,00	2.750.288.868	0,00		0,00		0,00	3.429.900.132			9.327.385.202			
2.17.06.1.01.02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Koperasi yang dikuatkan kelembagaannya	150.00 unit		0,00		150.00 unit	5.910.698.358	30,00	834.876.139	0,00	1.390.512.846	0,00		0,00		30,00	2.225.388.985			5.910.698.358			
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UKM yang telah diberdayakan	34.00 %		0,00		31.00 %	29.466.749.109	0,00	1.837.529.551	0,00	2.130.937.923	0,00		0,00		0,00	3.968.467.474			29.466.749.109			
		Persentase K-UKM yang berhasil mengakses pembiayaan	5.25 %		0,00		0,00 %		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
		Persentase peningkatan produksi Koperasi dan UKM yang dibina	2.00 %		0,00		0,00 %		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Renstra PD tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran			
			(outcome) / Kegiatan (output)		(Akhir Periode Renstra PD)		s.d. Renja PD tahun lalu 2021		tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		I		II		III		IV		Renja PD yang dievaluasi Tahun 2022		tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Renstra PD s/d Tahun 2022 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UKM yang diberi dukungan fasilitasi legalitas kelembagaan	225.00	Unit	0,00		50.00	Unit	29.466.749.109	0,00	1.837.529.551	0,00	2.130.937.923	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.968.467.474	29.466.749.109			
		Jumlah UKM yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	1050.00	Unit	0,00		325.00	Unit		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Jumlah UKM yang diberi dukungan fasilitasi pembiayaan	2160.00	Unit	0,00		715.00	Unit		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Jumlah UKM yang diberikan dukungan fasilitasi penguatan usaha	1045.00	Unit	0,00		320.00	Unit		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Jumlah K-UKM Terakses Informasi Perkoperasian dan UKM	390.00	Unit	0,00		0.00	Unit		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Jumlah K-UKM yang difasilitasi melalui sarana promosi produk K-UKM	440.00	Unit	0,00		0.00	Unit		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Jumlah KUKM yang mengakses permodalan lembaga keuangan perbankan	375.00	Unit	0,00		0.00	Unit		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Jumlah K-UKM yang difasilitasi akses permodalan melalui lembaga keuangan non perbankan	100.00	Unit	0,00		0.00	Unit		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Jumlah KUKM yang dikuatkan akses pembiayaannya	950.00	Unit	0,00		0.00	Unit		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Jumlah KUKM yang dikuatkan usahanya	1050.00	Unit	0,00		0.00	Unit		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Jumlah KUKM yang difasilitasi restrukturisasi usahanya	30.00	Unit	0,00		0.00	Unit		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.17.07.1.01.01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah UKM yang difasilitasi akses promosi	175.00	unit	0,00		175.00	unit	29.466.749.109	0,00	1.837.529.551	177,00	2.130.937.923	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	3.968.467.474	29.466.749.109				
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UKM yang telah dikembangkan	34.00	%	0,00		32.00	%	6.678.752.908	0,00	1.266.210.888	0,00	1.248.460.812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514.671.700	6.678.752.908				
		Pertumbuhan omset K-UKM yang dipasarkan produknya	0.00	%	0,00		0.00	%		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Persentase peningkatan produksi Koperasi dan UKM yang dibina	2.00	%	0,00		0.00	%		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UKM yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	450.00	Unit	0,00		150.00	Unit	6.678.752.908	0,00	1.266.210.888	0,00	1.248.460.812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514.671.700	6.678.752.908				
		Jumlah UKM yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan SDM	470.00	Unit	0,00		220.00	Unit		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Jumlah UKM yang bermitra	225.00	Unit	0,00		70.00	Unit		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Jumlah UKM yang dikuatkan kualitas produksinya	250.00	Unit	0,00		0.00	Unit		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Jumlah SDM UKM peserta pelatihan	100.00	Unit	0,00		0.00	Unit		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Jumlah UKM yang dikuatkan jaringan pemasaran	410.00	Unit	0,00		0.00	Unit		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.17.08.1.01.01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah UKM yang ditingkatkan kualitas produksinya	405.00	unit	0,00		405.00	unit	6.678.752.908	75,00	1.266.210.888	200,00	1.248.460.812	0,00	0,00	0,00	275,00	2.514.671.700	6.678.752.908					

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
			(Akhir Periode Renstra PD)		s.d. Renja PD tahun lalu 2021		tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		I		II		III		IV		Renja PD yang dievaluasi Tahun 2022		tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Renstra PD s/d Tahun 2022 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		Jumlah SDM UKM yang difasilitasi melalui pelatihan	300,00	Orang	0,00		300,00	Orang	250,00	0		50,00		0,00		0,00		300,00				

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berikut merupakan capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur berdasar indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dan dievaluasi setiap tahun serta proyeksi capaian indikator kinerja utama pada tahun 2021 dan 2022 yang berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019 – 2024 dan perubahan Renstra.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Provinsi Jawa Timur

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PD	TARGET NSPK	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH						REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI		CATATAN ANALISIS	
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Pertumbuhan Koperasi Aktif (Persen)	-	-	-	Indikator Sasaran	%	6						6						RPJMD Th. 2014 - 2019 dan Perubahannya
2	Jumlah Produk Koperasi dan UKM terstandarisasi (Produk)	-	-	-	Indikator Sasaran	Unit	15						46						
3	Persentase pengajuan pembiayaan yang lulus	-	-	-	Indikator Sasaran	%	60						84						



NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PD	TARGET NSPK	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH						REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI		CATATAN ANALISIS	
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023		
	verifikasi (Persen)																		
4	Kenaikan Volume Penjualan KUKM yang difasilitasi pemasarannya (Persen)	-	-	-	Indikator Sasaran	%	5						5,67						
5	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	-	-	-	LPPD	%							58,82						
6	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi Wirausaha	-	-	-	LPPD	%							100						
7	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha (Persen)	-	-	-	LPPD	%							21,19						
8	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	-	-	-	LPPD	%							100						
9	Persentase Pertumbuhan Nilai PDRB (Persen)	-	-	-	IKD	%	5.501	-3.5	1,75	2	2,25	2,5	5,78	-3,56	1,94	1,5	2,5	RPJMD Th. 2019 - 2024 dan Perubahan 1	



NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PD	TARGET NSPK	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH						REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	
10	Perkembangan Nilai Tambah Bruto KUKM (Rp)	-	-	-	IKU	Rp T	8,6	3,43	3,5	3,75	3,8	4	6,3	2,57	4,39	3,75	3,8	
11	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	-	-	-	IKU		80,2	80,4	82,5	82,75	82,8	83	81,92	82,11	84,75	82,51	82,71	
12	Persentase Indikator Program yang Tercapai (Persen)	-	-	-	Indikator Program	%	100	100	100	100	100	100	-	100	86	100	100	
13	Persentase Realisasi Anggaran (Persen)	-	-	-	Indikator Program	%	96,85	100	100	100	100	100	-	100	95,46	100	100	
14	Indeks Profesionalitas ASN	-	-	-	Indikator Program	%	85,78	87,78	88,78	89,78	90,78	91,78	-	87,78	72	73	74	
15	Persentase Koperasi Berkinerja Baik (Persen)	-	-	-	Indikator Program	%	70,58	70,7	70,76	70,82	70,88	70,94	-	62,77	70,77			
16	Pertumbuhan Omset K-UKM yang difasilitasi Pemasaran (Persen)	-	-	-	Indikator Program	%	3	3	3	3	3	3	-	1	4,02			
17	Persentase K-UKM yang berhasil mengakses pembiayaan (Persen)	-	-	-	Indikator Program	%	4,5	5	5,25	5,5	5,75	6	-	26,36	5,88			
18	Persentase Peningkatan Produksi Koperasi dan UKM yang dibina (Persen)	-	-	-	Indikator Program	%	2	2	2	2	2	2	-	-1,28	3,25			



NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PD	TARGET NSPK	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH						REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	
19	Persentase SDM K-UKM yang Bersertifikat (Persen)	-	-	-	Indikator Program	%	93	95	96	97	98	99	-	126,57	96			

Tabel di atas menunjukkan capaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 serta proyeksi tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2021 dan 2022, terdapat koreksi proyeksi target dari 8,85T dan 8,875T pada Renstra menjadi 3,5T dan 3,75T pada tahun 2021 dan 2022. Perubahan tersebut berdasar pada hasil proyeksi penghitungan nilai tambah bruto Koperasi dan UMKM dengan mempertimbangkan koreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2021 yang mengalami kontraksi akibat adanya pandemic *corona virus disease*.

Selanjutnya, di bawah ini merupakan tabel perkembangan koperasi di Jawa Timur Tahun 2019 – 2021. Data keragaan koperasi tersebut dapat dicermati melalui dari dua sisi, yaitu kuantitas dan kinerja usaha koperasi. Dari sisi kuantitas, Jumlah Koperasi di Jawa Timur per Triwulan IV Tahun 2021 adalah sebanyak 36.417 unit, dengan koperasi aktif sebanyak 22.848 unit. Terdapat kenaikan koperasi aktif sebesar 1,77% jika dibandingkan dengan kondisi pada Triwulan IV Tahun 2020. Hal terdapat kenaikan yang sangat lambat dikarenakan dampak dari adanya aturan Kementerian Koperasi dan UKM RI terkait keaktifan koperasi. Seiring dengan revitalisasi koperasi yang dilakukan, Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/ Kota juga melakukan pemetaan kembali akan jumlah koperasi aktif dan koperasi tidak aktif sehingga terdapat 13.569 koperasi akan dilakukan pembinaan/restrukturisasi koperasi agar menjadi aktif kembali.

Jika dibandingkan dengan Triwulan IV Tahun 2020, maka terjadi kenaikan 3,34 % jumlah koperasi dari 35.583 unit menjadi 36.417 unit selama satu tahun periode. Artinya terdapat pendirian 834 unit koperasi baru selama 1 tahun periode.

Tabel 0.1 Keragaan Koperasi di Jawa Timur

No	Uraian	Satuan	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021
1	Total Koperasi	Unit	33.863	35.583	36.417
	Koperasi Aktif	Unit	26.923	22.450	22.848
	Koperasi Tdk Aktif	Unit	6.868	13.133	13.569
2	Koperasi bersertifikat	Unit	3.917	10.493	13.245
3	Usulan Pembubaran Koperasi	Unit	2.444	2.114	-
3	Anggota	Org/Kop	4.611.091	3.925.385	3.820.616

No	Uraian	Satuan	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021
4	RAT	Kop	13.199	13.357	11.126
5	Manager	Orang	2.615	2.681	2.222
6	Karyawan	Orang	60.717	177.915	146.342
7	Modal Sendiri	Rp.000	13.501.533.935	14.073.006.896	20.841.516.203
8	Modal Luar	Rp.000	16.145.080.106	14.571.593.288	24.595.689.632
9	Total Asset	Rp.000	29.646.614.041	32.623.359.517	47.906.481.684
10	Volume Usaha	Rp.000	43.773.743.300	34.920.954.707	32.560.604.622
11	S H U	Rp.000	1.398.613.457	1.314.928.525	1.208.070.334

Untuk meningkatkan pemasaran produk-produk KUKM dan pengembangan jaringan serta networking KUKM Jawa Timur dilakukan fasilitasi promosi produk KUKM dengan mengikutsertakan produk KUKM ke dalam berbagai event pameran baik yang bersifat event regional, nasional maupun internasional. Pada Triwulan IV Tahun 2021, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur melalui pameran dalam negeri telah memfasilitasi 62 UKM untuk mengikuti 8 (delapan) event pameran. Dari keikutsertaan tersebut, total omset yang dihasilkan mencapai 186 Juta rupiah. Rata-rata omset pameran per UKM per event adalah sebesar 3 Juta rupiah. Nilai omset pameran berbeda-beda tergantung dari banyak stand yang difasilitasi dan lama pameran tersebut. Upaya perluasan akses pasar lainnya adalah misi dagang (Business-to-Business). yang mana di Pada tahun 2021, terdapat 3 (tiga) daerah tujuan misi dagang yaitu di Maluku Utara, Kepulauan Riau dan DKI Jakarta. Selain melalui pameran dan misi dagang, upaya fasilitasi pemasaran juga dilakukan melalui kemitraan baik dengan ritel modern, Asosiasi Koperasi Ritel Indonesia (Akrindo), maupun dengan market place online (bukalapak, shopee, blibli), pada tahun 2021 telah difasilitasi 343 KUKM untuk bermitra dengan marketplace online tersebut. Sebagai bagian dari upaya penguatan kualitas produk KUKM intervensi yang diberikan diantaranya juga dalam bentuk fasilitasi standarisasi KUKM dengan jenis standarisasi terdiri dari standarisasi halal, SNI, ISO dan merk.

Di bidang pembiayaan jumlah Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam/ Koperasi Jasa Keuangan Syariah/ Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi di Jawa Timur Triwulan IV Tahun 2021 adalah sebanyak 16.223 unit atau sebesar 72.09% dari jumlah total koperasi di Jawa Timur. Keragaan KSP/USP/KJKS/UJKS-Koperasi di Provinsi Jawa Timur. Jika dibandingkan dengan Triwulan IV Tahun 2020, maka terjadi peningkatan jumlah

KSP/USP/KJKS/UJKS-Koperasi dibanding data pada periode yang sama dari Triwulan IV 2020 ke Triwulan IV Tahun 2021 yaitu sebesar 3,32%. Sedangkan untuk jumlah anggota mengalami penurunan sebesar 2,67%. Hal ini karena semakin banyaknya koperasi yang tidak aktif. Meskipun terjadi penurunan jumlah anggota tidak menurunkan semangat pengurus untuk memajukan koperasi. Hal ini terlihat dari adanya pertumbuhan modal sendiri sebesar 48,1% pada tahun 2020 periode yang sama.

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dengan memperhatikan permasalahan yang ada, gambaran pelayanan perangkat daerah, sasaran jangka menengah, maka telah dirumuskan isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Koperasi dan UKM tahun 2019 – 2024 yang akan dilaksanakan setiap tahun adalah isu tentang daya saing Koperasi dan UKM di Jawa Timur yang belum maksimal.

Daya saing ini mencakup berbagai aspek, baik dari aspek kelembagaan, di mana Koperasi dan UKM perlu untuk ditingkatkan kualitas kelembagaannya agar memiliki posisi tawar lebih tinggi dalam perekonomian. Selanjutnya yaitu aspek produksi, di mana Dinas Koperasi dan UKM harus mendukung Koperasi dan UKM untuk dapat meningkatkan produktivitasnya, baik melalui perluasan jaringan produksi, pengembangan produk dan usaha, revitalisasi usaha, maupun fasilitasi untuk standardisasi produk. Yang ketiga yaitu aspek pembiayaan, di mana Koperasi dan UKM perlu difasilitasi untuk dipertemukan dengan pihak – pihak yang menyediakan berbagai akses pembiayaan, baik lembaga bank maupun non bank serta didorong untuk memperkuat jaringan pembiayaan antar Koperasi agar lebih efisien. Yang keempat adalah aspek pemasaran, di mana Dinas Koperasi dan UKM harus dapat memperluas akses pemasaran produk Koperasi dan UKM, baik secara online maupun offline. Dan yang juga penting adalah aspek Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi salah satu faktor penentu kecepatan berkembangnya Koperasi dan UKM.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKP



Berdasarkan RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif perangkat daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur tahun 2023 adalah sebagaimana tabel 2.4. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat banyak indikator program kegiatan yang tidak sesuai dengan uraian program kegiatan dalam rencana strategis. Indikator-indikator tersebut selanjutnya telah disesuaikan dalam kolom analisis kebutuhan. Hasil analisis kebutuhan tersebut merupakan usulan dari unit kerja yang ada di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur.

Tabel 2.4 Review terhadap RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan (RKPD)						
Kode	Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Daerah Dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
2.17.0.00.0.00.01.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					99.376.264.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					99.526.264.000	
21702	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Jawa Timur	1 Indeks Kepuasan Pelayanan Izin USP dan Izin Pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas USP	Persen	87,00	1.228.968.000	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Jawa Timur	1 Indeks Kepuasan Pelayanan Izin USP dan Izin Pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas USP	Persen			
21702101	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jawa Timur	1 Jumlah penerbitan izin USP - Koperasi	Unit	35,00	614.484.000	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jawa Timur	1 Jumlah penerbitan izin USP - Koperasi	Unit			
2170210101	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jawa Timur	1 Jumlah Koperasi yang difasilitasi perijinan usaha simpan pinjam	Unit	170,00	614.484.000	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jawa Timur	1 Jumlah Koperasi yang difasilitasi perijinan usaha simpan pinjam	Unit			
21702102	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jawa Timur	1 Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam koperasi	Persen	100,00	614.484.000	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jawa Timur	1 Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam koperasi	Persen			

RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan (RKPD)						
Kode	Daerah Dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Daerah Dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
2170210201	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jawa Timur	2 Jumlah Koperasi yang difasilitasi perijinan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas	Unit	320,00	614.484.000	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jawa Timur	2 Jumlah Koperasi yang difasilitasi perijinan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas	Unit			
21703	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jawa Timur	1 Persentase Koperasi yang Berkualitas	Persen	63,00	995.000.000	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jawa Timur	1 Persentase Koperasi yang Berkualitas	Persen			
21703101	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jawa Timur	1 Persentase pemeriksaan dan pengawasan koperasi	Persen	45,00	995.000.000	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jawa Timur	1 Persentase pemeriksaan dan pengawasan koperasi	Persen			
2170310101	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jawa Timur	1 Jumlah Koperasi yang difasilitasi peningkatan akuntabilitas	Unit	315,00	995.000.000	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jawa Timur	1 Jumlah Koperasi yang difasilitasi peningkatan akuntabilitas	Unit			
21704	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jawa Timur	1 Persentase koperasi sehat	Persen	22,00	765.000.000	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jawa Timur	1 Persentase koperasi sehat	Persen			
21704101	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya	Jawa Timur	1 Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya	Persen	27,00	765.000.000	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah	Jawa Timur	1 Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya	Persen			

RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan (RKPD)						
Kode	Daerah Dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Daerah Dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						
2170410101	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jawa Timur	1 Jumlah Koperasi yang difasilitasi penilaian kesehatan	Unit	130,00	765.000.000	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jawa Timur	1 Jumlah Koperasi yang difasilitasi penilaian kesehatan	Unit			
21705	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jawa Timur	1 Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan	Persen	96,00	673.200.000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jawa Timur	1 Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan	Persen			
21705101	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jawa Timur	1 Persentase jumlah pengelola koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian	Persen	32,00	673.200.000	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jawa Timur	1 Persentase jumlah pengelola koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian	Persen			
2170510101	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jawa Timur	1 Jumlah modul atau media pelatihan yang dikembangkan atau dihasilkan	Unit	1,00	673.200.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jawa Timur	1 Jumlah modul atau media pelatihan yang dikembangkan atau dihasilkan	Unit			
		Jawa Timur	2 Jumlah SDM Koperasi yang difasilitasi melalui pelatihan perkoperasian	Orang	210,00	673.200.000		Jawa Timur	2 Jumlah SDM Koperasi yang difasilitasi melalui pelatihan perkoperasian	Orang			
		Jawa Timur	3 Jumlah SDM Koperasi yang difasilitasi peningkatan kapasitas SDM	Orang				Jawa Timur	3 Jumlah SDM Koperasi yang difasilitasi peningkatan kapasitas SDM	Orang			

RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan (RKPD)						
Kode	Daerah Dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Daerah Dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
21705102	Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jawa Timur	1 Jumlah SDM UKM yang ditingkatkan kapasitasnya				Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jawa Timur	1 Jumlah SDM UKM yang ditingkatkan kapasitasnya				
2170510201	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jawa Timur	1 Jumlah SDM UKM yang ditingkatkan kapasitasnya				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jawa Timur	1 Jumlah SDM UKM yang ditingkatkan kapasitasnya				
21706	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jawa Timur	1 Persentase Koperasi yang telah diberdayakan dan dilindungi	Persen	69,00	22.725.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jawa Timur	1 Persentase Koperasi yang telah diberdayakan dan dilindungi	Persen			
21706101	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jawa Timur	1 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	Persen	30,00	22.725.000.000	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jawa Timur	1 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	Persen			
		Jawa Timur	2 Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Persen	24,00	22.725.000.000		Jawa Timur	2 Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Persen			
		Jawa Timur	3 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan	Persen	44,00	22.725.000.000		Jawa Timur	3 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan	Persen			
		Jawa Timur	4 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan usaha	Persen	31,00	22.725.000.000		Jawa Timur	4 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan usaha	Persen			
2170610101	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jawa Timur	1 Jumlah KSP/USP-Koperasi dan KSP-PS/USP-PS Koperasi yang difasilitasi penguatan usahanya	Unit	1.230,00	17.170.000.000	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jawa Timur	1 Jumlah KSP/USP-Koperasi dan KSP-PS/USP-PS Koperasi yang difasilitasi penguatan usahanya	Unit			

RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan (RKPD)						
Kode	Daerah Dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Daerah Dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
		Jawa Timur	2 Jumlah koperasi yang difasilitasi penguatan akses permodalan	Unit	170,00	17.170.000.000		Jawa Timur	2 Jumlah koperasi yang difasilitasi penguatan akses permodalan	Unit			
		Jawa Timur	3 Jumlah Koperasi yang difasilitasi dalam penyediaan informasi pemasaran dan kewirausahaan	Unit		17.170.000.000		Jawa Timur	3 Jumlah Koperasi yang difasilitasi dalam penyediaan informasi pemasaran dan kewirausahaan	Unit			
		Jawa Timur	4 Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk direstrukturisasi usahanya	Unit	212,00	17.170.000.000		Jawa Timur	4 Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk direstrukturisasi usahanya	Unit			
2170610102	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jawa Timur	1 Jumlah koperasi yang difasilitasi penguatan akses pembiayaan	Unit	680,00	5.555.000.000	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jawa Timur	1 Jumlah koperasi yang difasilitasi penguatan akses pembiayaan	Unit			
		Jawa Timur	2 Jumlah Koperasi yang difasilitasi akses promosi	Unit	50,00	5.555.000.000		Jawa Timur	2 Jumlah Koperasi yang difasilitasi akses promosi	Unit			
		Jawa Timur	3 Jumlah koperasi yang difasilitasi peningkatan kualitas produksinya	Unit	85,00	5.555.000.000		Jawa Timur	3 Jumlah koperasi yang difasilitasi peningkatan kualitas produksinya	Unit			
		Jawa Timur	4 Jumlah Koperasi yang dikuatkan kelembagaannya	Unit	120,00	5.555.000.000		Jawa Timur	4 Jumlah Koperasi yang dikuatkan kelembagaannya	Unit			
		Jawa Timur	5 Jumlah koperasi yang terakses informasi perkoperasian	Unit	210,00	5.555.000.000		Jawa Timur	5 Jumlah koperasi yang terakses informasi perkoperasian	Unit			
21707	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,	Jawa Timur	1 Persentase UKM yang telah diberdayakan	Persen	33,00	19.809.325.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,	Jawa Timur	1 Persentase UKM yang telah diberdayakan	Persen			

RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan (RKPD)							
Kode	Daerah Dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Daerah Dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting	
	USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)							
21707101	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jawa Timur	1	Jumlah UKM yang diberi dukungan fasilitas legalitas kelembagaan	Unit	75,00	19.809.325.000	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jawa Timur	1	Jumlah UKM yang diberi dukungan fasilitas legalitas kelembagaan	Unit		
		Jawa Timur	2	Jumlah UKM yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran	Unit	350,00	19.809.325.000		Jawa Timur	2	Jumlah UKM yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran	Unit		
		Jawa Timur	3	Jumlah UKM yang diberi dukungan fasilitas pembiayaan	Unit	720,00	19.809.325.000		Jawa Timur	3	Jumlah UKM yang diberi dukungan fasilitas pembiayaan	Unit		
		Jawa Timur	4	Jumlah UKM yang diberikan dukungan fasilitas penguatan usaha	Unit	350,00	19.809.325.000		Jawa Timur	4	Jumlah UKM yang diberikan dukungan fasilitas penguatan usaha	Unit		
2170710101	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jawa Timur	1	Jumlah UKM yang terakses informasi kelembagaan UKM	Unit	250,00	19.809.325.000	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jawa Timur	1	Jumlah UKM yang terakses informasi kelembagaan UKM	Unit		
		Jawa Timur	2	Jumlah UKM yang difasilitasi akses promosi	Unit	180,00	19.809.325.000		Jawa Timur	2	Jumlah UKM yang difasilitasi akses promosi	Unit		
		Jawa Timur	3	Jumlah UKM yang difasilitasi penguatan akses permodalan	Unit	390,00	19.809.325.000		Jawa Timur	3	Jumlah UKM yang difasilitasi penguatan akses permodalan	Unit		
		Jawa Timur	4	Jumlah UKM yang difasilitasi penguatan	Unit	430,00	19.809.325.000		Jawa Timur	4	Jumlah UKM yang difasilitasi penguatan	Unit		

RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan (RKPD)						
Kode	Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Daerah Dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
			akses pembiayaan						akses pembiayaan				
		Jawa Timur	5 Jumlah UKM yang difasilitasi pengembangan usaha	Unit	1.100,00	19.809.325.000		Jawa Timur	5 Jumlah UKM yang difasilitasi pengembangan usaha	Unit			
		Jawa Timur	6 Jumlah UKM yang difasilitasi restrukturisasi usahanya	Unit	650,00	19.809.325.000		Jawa Timur	6 Jumlah UKM yang difasilitasi restrukturisasi usahanya	Unit			
21708	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jawa Timur	1 Persentase UKM yang telah dikembangkan	Persen	33,00	6.363.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jawa Timur	1 Persentase UKM yang telah dikembangkan	Persen			
21708101	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jawa Timur	1 Jumlah UKM yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Unit	150,00	6.363.000.000	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jawa Timur	1 Jumlah UKM yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Unit			
		Jawa Timur	2 Jumlah UKM yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan SDM	Unit		6.363.000.000		Jawa Timur	2 Jumlah UKM yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan SDM	Unit			
		Jawa Timur	3 Jumlah UKM yang bermitra	Unit		6.363.000.000		Jawa Timur	3 Jumlah UKM yang bermitra	Unit			
2170810101	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jawa Timur	1 Jumlah UKM yang ditingkatkan kualitas produksinya	Unit	600,00	6.363.000.000	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jawa Timur	1 Jumlah UKM yang ditingkatkan kualitas produksinya	Unit			
		Jawa Timur	2 Jumlah SDM UKM yang difasilitasi melalui pelatihan	Orang	200,00	6.363.000.000		Jawa Timur	2 Jumlah SDM UKM yang difasilitasi melalui pelatihan	Orang			
		Jawa Timur	3 Jumlah UKM yang dikuatkan jaringan pemasaran	UKM	210,00	6.363.000.000		Jawa Timur	3 Jumlah UKM yang dikuatkan jaringan pemasaran	UKM			
		Jawa Timur	4 Jumlah UKM yang difasilitasi dalam penyediaan informasi pemasaran	Unit	180,00	6.363.000.000		Jawa Timur	4 Jumlah UKM yang difasilitasi dalam penyediaan informasi pemasaran	Unit			

RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan (RKPD)							
Kode	Daerah Dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Daerah Dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting	
			dan kewirausahaan						dan kewirausahaan					
XXX01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jawa Timur	1	Persentase indikator program yang tercapai	persen	100,00	38.703.474.800	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jawa Timur	1	Persentase indikator program yang tercapai	persen		
		Jawa Timur	2	Persentase realisasi anggaran	persen	100,00	38.703.474.800		Jawa Timur	2	Persentase realisasi anggaran	persen		
		Jawa Timur	3	Indeks profesionalitas ASN	persen	74,00	38.703.474.800		Jawa Timur	3	Indeks profesionalitas ASN	persen		
XXX01101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jawa Timur	1	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	Dokumen			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jawa Timur	1	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	Dokumen		
		Jawa Timur	2	Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	Dokumen				Jawa Timur	2	Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	Dokumen		
XXX0110101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jawa Timur	1	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	4,00	712.470.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jawa Timur	1	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen		
XXX0110102	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jawa Timur	1	Jumlah dokumen RKA	Dokumen	1,00	12.036.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jawa Timur	1	Jumlah dokumen RKA	Dokumen		
XXX0110103	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jawa Timur	1	Jumlah dokumen RKA Perubahan	Dokumen	1,00	8.568.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jawa Timur	1	Jumlah dokumen RKA Perubahan	Dokumen		
XXX0110104	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jawa Timur	1	Jumlah dokumen DPA	Dokumen	1,00	6.120.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jawa Timur	1	Jumlah dokumen DPA	Dokumen		
XXX0110105	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jawa Timur	1	Jumlah dokumen DPA Perubahan	Dokumen	1,00	6.120.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jawa Timur	1	Jumlah dokumen DPA Perubahan	Dokumen		
XXX0110106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jawa Timur	1	Jumlah dokumen capaian kinerja	Dokumen	5,00	753.296.700	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jawa Timur	1	Jumlah dokumen capaian kinerja	Dokumen		

RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan (RKPD)						
Kode	Daerah Dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Daerah Dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Realisasi Kinerja SKPD						Realisasi Kinerja SKPD						
XXX0110107	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jawa Timur	1	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	Dokumen	5,00	38.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jawa Timur	1	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	Dokumen	
XXX01102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jawa Timur	1	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Dokumen	1,00	29.125.434.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jawa Timur	1	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Dokumen	
XXX0110201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jawa Timur	1	jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	laporan	12,00	27.941.241.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jawa Timur	1	jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	laporan	
XXX0110202	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jawa Timur	1	jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	12,00	603.800.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jawa Timur	1	jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	
XXX0110203	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jawa Timur	1	Jumlah laporan verifikasi penatausahaan	Laporan	12,00	531.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jawa Timur	1	Jumlah laporan verifikasi penatausahaan	Laporan	
XXX0110204	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jawa Timur	1	Jumlah Laporan akuntansi perangkat daerah	Laporan	12,00	12.120.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jawa Timur	1	Jumlah Laporan akuntansi perangkat daerah	Laporan	
XXX0110205	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jawa Timur	1	Jumlah dokumen keuangan SKPD	Dokumen	12,00	3.030.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jawa Timur	1	Jumlah dokumen keuangan SKPD	Dokumen	
XXX0110206	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jawa Timur	1	jumlah dokumen tanggapan atas LHP	Dokumen	1,00	17.719.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jawa Timur	1	jumlah dokumen tanggapan atas LHP	Dokumen	
XXX0110207	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jawa Timur	1	Jumlah laporan keuangan	Laporan	12,00	13.534.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jawa Timur	1	Jumlah laporan keuangan	Laporan	
XXX0110208	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jawa Timur	1	Jumlah laporan prognosis	Laporan	1,00	2.990.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jawa Timur	1	Jumlah laporan prognosis	Laporan	

RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan (RKPD)						
Kode	Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Daerah Dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
XXX01105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jawa Timur	1 Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	2,00	1.799.520.500	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jawa Timur	1 Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen			
XXX0110501	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jawa Timur	1 Jumlah sarana dan prasarana yg tepenuhi	Laporan	1,00	129.150.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jawa Timur	1 Jumlah sarana dan prasarana yg tepenuhi	Laporan			
XXX0110502	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jawa Timur	1 jumlah pengadaan pakaian dinas	Paket	2,00	187.809.500	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jawa Timur	1 jumlah pengadaan pakaian dinas	Paket			
XXX0110503	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jawa Timur	1 Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian	Laporan	1,00	1.121.366.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jawa Timur	1 Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian	Laporan			
XXX0110504	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jawa Timur	1 Jumlah laporan data pegawai	Laporan		88.195.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jawa Timur	1 Jumlah laporan data pegawai	Laporan			
XXX0110509	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jawa Timur	1 Jumlah laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Laporan	1,00	273.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jawa Timur	1 Jumlah laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Laporan			
XXX01106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jawa Timur	1 Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	dokumen	1,00	1.123.990.600	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jawa Timur	1 Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	dokumen			
XXX0110601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jawa Timur	1 jumlah paket pengadaan	Paket	1,00	27.189.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jawa Timur	1 jumlah paket pengadaan	Paket			
XXX0110602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jawa Timur	1 jumlah paket pengadaan	Paket	2,00	297.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jawa Timur	1 jumlah paket pengadaan	Paket			
XXX0110603	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jawa Timur	1 jumlah paket pengadaan	Paket	1,00	27.270.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jawa Timur	1 jumlah paket pengadaan	Paket			
XXX0110605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jawa Timur	1 jumlah paket pengadaan	Paket	1,00	192.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jawa Timur	1 jumlah paket pengadaan	Paket			

RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan (RKPD)						
Kode	Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Daerah Dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
XXX0110606	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jawa Timur	1 jumlah paket pengadaan	Paket	1,00	20.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jawa Timur	1 jumlah paket pengadaan	Paket			
XXX0110607	Penyediaan Bahan/Material	Jawa Timur	1 jumlah paket pengadaan	Paket	1,00	7.752.000	Penyediaan Bahan/Material	Jawa Timur	1 jumlah paket pengadaan	Paket			
XXX0110608	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jawa Timur	1 jumlah paket pengadaan	Paket	1,00	82.779.600	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jawa Timur	1 jumlah paket pengadaan	Paket			
XXX0110609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jawa Timur	1 Jumlah Laporan	Laporan	1,00	470.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jawa Timur	1 Jumlah Laporan	Laporan			
XXX01108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jawa Timur	1 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1,00	4.042.919.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jawa Timur	1 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen			
XXX0110801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jawa Timur	1 Jumlah pengiriman dokumen	Paket	1,00	10.403.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jawa Timur	1 Jumlah pengiriman dokumen	Paket			
XXX0110802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jawa Timur	1 Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12,00	1.278.660.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jawa Timur	1 Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan			
XXX0110803	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jawa Timur	1 Jumlah Jasa	Paket	1,00	71.710.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jawa Timur	1 Jumlah Jasa	Paket			
XXX0110804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jawa Timur	1 Jumlah Jasa	Paket	2,00	2.682.146.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jawa Timur	1 Jumlah Jasa	Paket			
XXX01109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jawa Timur	1 jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	dokumen	1,00	1.075.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jawa Timur	1 jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	dokumen			
XXX0110901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jawa Timur	1 Jumlah Jasa	Paket	1,00	189.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jawa Timur	1 Jumlah Jasa	Paket			

RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan (RKPD)						
Kode	Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Daerah Dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
XXX0110902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jawa Timur	1 Jumlah Jasa	paket	2,00	273.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jawa Timur	1 Jumlah Jasa	paket			
XXX0110906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jawa Timur	1 Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Paket	2,00	186.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jawa Timur	1 Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Paket			
XXX0110909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jawa Timur	1 Jumlah Gedung yang dipelihara	Paket	2,00	426.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jawa Timur	1 Jumlah Gedung yang dipelihara	Paket			

2.5 PENELAHAH USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur adalah hasil telaah terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi dan perguruan tinggi.

Pada tabel 2.5 berisi usulan – usulan Kabupaten Kota yang telah dibahas saat desk musrenbang untuk RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 dan diakomodir pada batasan keikutsertaan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dan tetap memperhatikan ketersediaan anggaran. Sedangkan pada tabel 2.6.

Tabel 2.5

Usulan Kabupaten Kota Hasil Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2023 yang diakomodir

No	KabupatenKota	Usulan	Permasalahan	Status Desk	Catatan Desk
1	Kabupaten Bangkalan	#BP Bimbingan Teknis Pengawasan Koperasi yang anggotanya lintas kabupaten / kota dalam satu provinsi	Kurang optimalnya peran pengawasan koperasi	Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD	diakomodir dengan sifat kepesertaan dan harus sesuai kewenangan provinsi serta memperhatikan ketersediaan anggaran
2	Kabupaten Bangkalan	#BP FASILITASI SERTIFIKASI PRODUK KOPERASI	Masih minimnya produk koperasi yang bersertifikat	Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD	diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi dan memperhatikan anggaran yang ada
3	Kabupaten Bangkalan	#BP FASILITASI SERTIFIKASI PRODUK UKM	Masih minimnya produk UKM yang bersertifikat	Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD	diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi dan memperhatikan anggaran yang ada
4	Kabupaten Bangkalan	#BP FASILITASI PENDAFTARAN MEREK PRODUK KOPERASI	Masih minimnya produk koperasi yang mendaftarkan/mempunyai hak merk	Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD	diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi dan memperhatikan anggaran yang ada
5	Kabupaten Bangkalan	#BP FASILITASI PENDAFTARAN MEREK PRODUK UKM	Masih minimnya produk UKM yang mendaftarkan/mempunyai hak merk	Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD	diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi dan memperhatikan anggaran yang ada
6	Kabupaten Blitar	#BP Bimbingan Teknis Pengawasan Koperasi yang anggotanya lintas kabupaten / kota dalam satu provinsi	BP Blmtek Koperasi	Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD	diakomodir dengan sifat kepesertaan dan menyesuaikan ketersediaan anggaran
7	Kabupaten Blitar	#BP FASILITASI PENDAFTARAN MEREK PRODUK KOPERASI	BP Fasilitasi merk Produk Koperasi	Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD	diakomodir dengan sifat kepesertaan dan menyesuaikan ketersediaan anggaran
8	Kabupaten Blitar	#BP FASILITASI SERTIFIKASI PRODUK KOPERASI	Sertifikasi Produk Koperasi	Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD	diakomodir dengan sifat kepesertaan dan menyesuaikan ketersediaan anggaran
9	Kabupaten Bondowoso	#BP FASILITASI PENDAFTARAN MEREK PRODUK UKM	Masih banyak produk UKM yang belum terstandarisasi	Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD	diakomodir sebagai peserta dan menyesuaikan ketersediaan anggaran

No	KabupatenKota	Usulan	Permasalahan	Status Desk	Catatan Desk
10	Kabupaten Bondowoso	#BP PELATIHAN MANAJERIAL BAGI SDM UKM	Masih minimnya wawasan dan kemampuan SDM UKM dalam pengembangan usaha	Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD	diakomodir sebagai peserta dan menyesuaikan ketersediaan anggaran
12	Kabupaten Jombang	#BP Bimbingan Teknis Pengawasan Koperasi yang anggotanya lintas kabupaten / kota dalam satu provinsi	Kegiatan pengawasan untuk koperasi yang anggotanya lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi belum bisa dilaksanakan secara maksimal	Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD	usulan untuk 6 orang peserta (Koperasi) minimal, RAB perlu disesuaikan di SIPD. dapat diakomodir dengan sifat kepesertaan dan harus sesuai kewenangan provinsi serta memperhatikan ketersediaan anggaran.
13	Kabupaten Jombang	#BP PENDAMPINGAN AKSES PEMBIAYAAN FORMAL (PERBANKAN) BAGI KOPERASI	Keterbatasan KUKM dalam mengakses dana untuk penguatan permodalan dan pengembangan usaha	Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD	dapat diajukan melalui sistem aplikasi pengajuan dagulir.
23	Kabupaten Lumajang	#BP Bimbingan Teknis Pengawasan Koperasi yang anggotanya lintas kabupaten / kota dalam satu provinsi	Bimtek pengawasan koperasi yang anggotanya lintas kabupaten / kota dalam satu provinsi	Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD	Diakomodir sebagai peserta dan sesuai kewenangan provinsi dan ketersediaan anggaran
24	Kabupaten Lumajang	#BP Bimbingan Teknis Pengawasan Koperasi yang anggotanya lintas kabupaten / kota dalam satu provinsi	pendampingan akses pembiayaan formal (perbankan) bagi koperasi	Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD	Diakomodir sebagai peserta dan sesuai kewenangan provinsi dan ketersediaan anggaran, agar usulan disesuaikan kembali. Bisa juga diakses pada aplikasi SAPDA/ melalui website dinas koperasi dan UKM Prov. Jatim
26	Kabupaten Madiun	#BP Bimbingan Teknis Pengawasan Koperasi yang anggotanya lintas kabupaten / kota dalam satu provinsi	Kurangnya tenaga pengawas dan pemeriksa koperasi yang berkompentensi	Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD	diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi dan memperhatikan anggaran yang ada untuk jumlah pesertanya
27	Kabupaten Madiun	#BP FASILITASI PENDAFTARAN MEREK PRODUK UKM	masih banyak ukm yang belum mendaftarkan merek	Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD	diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi dan memperhatikan anggaran yang ada

No	KabupatenKota	Usulan	Permasalahan	Status Desk	Catatan Desk
28	Kabupaten Madiun	#BP PELATIHAN MANAJERIAL BAGI SDM UKM	SDM UKM yang belum terlatih terkait standart manajerial	Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD	diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi dan memperhatikan anggaran yang ada
31	Kabupaten Magetan	#BP Bimbingan Teknis Pengawasan Koperasi yang anggotanya lintas kabupaten / kota dalam satu provinsi	Perlunya Bimbingan teknis untuk koperasi cabang yang ada di kabupaten Magetan	Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD	diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi dan memperhatikan anggaran yang ada
32	Kabupaten Magetan	#BP FASILITASI PENGUATAN JARINGAN PEMASARAN/KEMITRAAN PRODUK UKM	Perlunya Kemitraan dengan Toko Modern	Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD	diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi dan memperhatikan anggaran yang ada
33	Kabupaten Magetan	#BP PELATIHAN MANAJERIAL BAGI SDM UKM	Perlunya Pelatihan Packaging bagi SDM UKM	Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD	diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi dan memperhatikan anggaran yang ada
34	Kabupaten Magetan	#BP PELATIHAN MANAJERIAL BAGI SDM UKM	Perlunya Pelatihan Produk tahu dan pengadaan alat produksi tahu	Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD	diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi dan memperhatikan anggaran yang ada
35	Kabupaten Magetan	#BP PELATIHAN MANAJERIAL BAGI SDM UKM	Perlunya Pelatihan aneka minuman dan pengadaan Both, sealer cup, dll)	Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD	diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi dan memperhatikan anggaran yang ada
36	Kabupaten Malang	#BP FASILITASI PENGUATAN JARINGAN PEMASARAN/KEMITRAAN PRODUK UKM	Rumah Kurasi Bagi UMKM	Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD	diakomodir dengan sifat kepesertaan dan menyesuaikan ketersediaan anggaran
37	Kabupaten Malang	#BP PELATIHAN MANAJERIAL BAGI SDM UKM	Penguatan Kualitas Produk Melalui : Bimtek Packaging, Fasilitasi Legalitas Merk, Fasilitasi Legalitas Halal	Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD	diakomodir dengan sifat kepesertaan dan menyesuaikan ketersediaan anggaran. permasalahan dan usulan untuk disesuaikan kembali
38	Kabupaten Malang	#BP Bimbingan Teknis Pengawasan Koperasi yang anggotanya lintas kabupaten / kota dalam satu provinsi	Banyaknya koperasi binaan prov di kabupaten belum dilakukan bimbingan teknis tentang pengawasan sesuai perdep no 15 tahun 2021	Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD	diakomodir dengan sifat kepesertaan dan menyesuaikan ketersediaan anggaran

No	KabupatenKota	Usulan	Permasalahan	Status Desk	Catatan Desk
39	Kabupaten Malang	#BP FASILITASI PENDAFTARAN MEREK PRODUK UKM	Penguatan Kualitas Pruduk Melalui Bimtek Packaging Fasilitasi Legalitas Merek	Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD	diakomodir sebagai peserta
41	Kabupaten Ngawi	#BP FASILITASI SERTIFIKASI PRODUK UKM	Sertifikasi produk UKM	Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD	diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi dan memperhatikan anggaran yang ada
42	Kabupaten Ngawi	#BP FASILITASI PENDAFTARAN MEREK PRODUK UKM	Pembiayaan HAKi/Merk produk UKM	Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD	diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi dan memperhatikan anggaran yang ada
43	Kabupaten Ngawi	#BP FASILITASI PENGUATAN JARINGAN PEMASARAN/KEMITRAAN PRODUK UKM	E-commerce dan packaging	Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD	diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi dan memperhatikan anggaran yang ada
44	Kabupaten Ngawi	#BP PELATIHAN MANAJERIAL BAGI SDM UKM	Pelatihan bagi SDM Pengelola Koperasi dan UKM	Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD	diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi dan memperhatikan anggaran yang ada
45	Kabupaten Pacitan	#BP FASILITASI SERTIFIKASI PRODUK UKM	Banyak produk UMKM di Pacitan yang belum bersertifikat halal	Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD	diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi dan memperhatikan anggaran yang ada
46	Kabupaten Pacitan	#BP FASILITASI PENGUATAN JARINGAN PEMASARAN/KEMITRAAN PRODUK UKM	Keterbatasan jaringan pemasaran dan keterbatasan sumber daya untuk memperluas pasar	Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD	diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi dan memperhatikan anggaran yang ada
47	Kabupaten Pacitan	#BP PELATIHAN MANAJERIAL BAGI SDM UKM	kurangnya pemahaman pelaku UMKM dalam menyiapkan Rencana bisnis yang efektif yang dapat membantu meningkatkan tingkat kelangsungan hidup bagi wirausahawan yang inovatif	Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD	diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi dan memperhatikan anggaran yang ada. bisa diakses website SIJAWARA
48	Kabupaten Pacitan	#BP FASILITASI PENDAFTARAN MEREK PRODUK UKM	Banyak UMKM yang belum memiliki izin usaha yang resmi	Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD	diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi dan memperhatikan anggaran yang ada (sebaiknya merk yang sudah siap)
49	Kabupaten Pamekasan	#BP PELATIHAN MANAJERIAL BAGI SDM UKM	Masih rendahnya sistem manajemen UKM	Disetujui dan dilanjutkan	diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi dan menyesuaikan ketersediaan

No	KabupatenKota	Usulan	Permasalahan	Status Desk	Catatan Desk
				pembahasan TAPD	anggaran. dapat mengakses pelatihan secara online juga melalui website SIJAWARA
51	Kabupaten Ponorogo	#BP Bimbingan Teknis Pengawasan Koperasi yang anggotanya lintas kabupaten / kota dalam satu provinsi	Sering Terjadi Kecurangan dari karyawan yang merugikan koperasi Rp. 100.000.000	Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD	diakomodir sebagai peserta dan memperhatikan anggaran yang ada
52	Kabupaten Ponorogo	#BP FASILITASI SERTIFIKASI PRODUK KOPERASI	Produk tidak bisa dipasarkan skala luas karena belum lengkap Ijin edarnya baik Halal maupun BPOM Rp. 350.000.000	Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD	diakomodir sebagai peserta dan memperhatikan anggaran yang ada
53	Kabupaten Ponorogo	#BP FASILITASI PENDAFTARAN MEREK PRODUK KOPERASI	Produk tidak bisa dipasarkan skala luas karena Merk belum terdaftar, selain itu Merk menjadi syarat produk untuk mengurus BPOM Rp. 100.000.000	Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD	diakomodir dengan sifat kepesertaan dan harus sesuai kewenangan provinsi serta memperhatikan ketersediaan anggaran
54	Kabupaten Ponorogo	#BP FASILITASI SERTIFIKASI PRODUK UKM	BELUM TERSEDIANYA SERTIFIKASI PRODUK UKM Rp. 325.000.000	Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD	diakomodir dengan sifat kepesertaan dan harus sesuai kewenangan provinsi serta memperhatikan ketersediaan anggaran
61	Kabupaten Probolinggo	#BP FASILITASI PENGUATAN JARINGAN PEMASARAN/KEMITRAAN PRODUK UKM	Minimnya Pengetahuan tentang pemasaran Kopi Secara Online	Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD	diakomodir sebagai peserta
62	Kabupaten Sidoarjo	#BP PENDAMPINGAN AKSES PEMBIAYAAN FORMAL (PERBANKAN) BAGI KOPERASI	Banyak koperasi yang membutuhkan modal tambahan koperasi, namun beberapa koperasi tidak mengetahui mekanismenya	Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD	pengajuan dagulir bisa melalui sistem aplikasi pengajuan dagulir
63	Kabupaten Sidoarjo	#BP FASILITASI SERTIFIKASI PRODUK UKM	Mamberikan fasilitas kepada Usaha Mikro agar mendapatkan legalitas untuk usahanya. Mendukung salah satu program prioritas yaitu Usaha Mikro naik kelas yang salah satu kriterianya adalah "Memiliki Legalitas Usaha" (SK Kepala Dinas tentang Ketentuan Usaha Mikro Naik Kelas, RPJMD 2021-2016)	Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD	diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi (UKM) dan memperhatikan anggaran yang ada

No	KabupatenKota	Usulan	Permasalahan	Status Desk	Catatan Desk
64	Kabupaten Sidoarjo	#BP FASILITASI PENDAFTARAN MEREK PRODUK UKM	Memberikan fasilitas kepada Usaha Mikro agar mendapatkan legalitas untuk usahanya. Mendukung salah satu program prioritas yaitu Usaha Mikro naik kelas yang salah satu kriterianya adalah "Memiliki Legalitas Usaha" (SK Kepala Dinas tentang Ketentuan Usaha Mikro Naik Kelas, RPJMD 2021-2016)	Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD	diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi (UKM) dan memperhatikan anggaran yang ada
65	Kabupaten Sidoarjo	#BP FASILITASI PENGUATAN JARINGAN PEMASARAN/KEMITRAAN PRODUK UKM	Memberikan fasilitas kepada Usaha Mikro agar dapat mengembangkan usahanya. Mendukung salah satu program prioritas yaitu Usaha Mikro naik kelas yang salah satu kriterianya adalah "Memanfaatkan teknologi informasi di bidang pemasaran" (SK Kepala Dinas tentang Ketentuan Usaha Mikro Naik Kelas, RPJMD 2021-2016)	Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD	diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi (UKM) dan memperhatikan anggaran yang ada
66	Kabupaten Sidoarjo	#BP PELATIHAN MANAJERIAL BAGI SDM UKM	Memberikan fasilitas kepada Usaha Mikro agar dapat mengembangkan usahanya. Mendukung salah satu program prioritas yaitu Usaha Mikro naik kelas yang salah satu kriterianya adalah "Mengikuti kegiatan pelatihan dan bersertifikat" (SK Kepala Dinas tentang Ketentuan Usaha Mikro Naik Kelas, RPJMD 2021-2016)	Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD	diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi (UKM) dan memperhatikan anggaran yang ada
67	Kabupaten Situbondo	#BP FASILITASI PENGUATAN JARINGAN PEMASARAN/KEMITRAAN PRODUK UKM	Masih lemahnya Jaringan Pemasaran/kemitraan produk UKM di Kabupaten Situbondo Volume: 50 Orang Rp. 150.000.000	Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD	diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi dan memperhatikan anggaran yang ada
68	Kabupaten Situbondo	#BP PELATIHAN MANAJERIAL BAGI SDM UKM	Masih Lemahnya Manajerial SDM UKM kab. situbondo Volume: 50 Orang Rp. 150.000.000	Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD	diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi dan memperhatikan anggaran yang ada
69	Kabupaten Sumenep	#BP PENDAMPINGAN AKSES PEMBIAYAAN FORMAL (PERBANKAN) BAGI UKM	Keberadaan UKM yang membutuhkan penguatan modal (100 UKM)	Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD	diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi dan memperhatikan anggaran yang ada. bisa diakses juga melalui aplikasi SAPDA

No	KabupatenKota	Usulan	Permasalahan	Status Desk	Catatan Desk
70	Kabupaten Sumenep	#BP FASILITASI SERTIFIKASI PRODUK UKM	Produk ukm membutuhkan sertifikasi halal dan perijinan untuk memperluas pemasaran (50 UKM)	Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD	diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi dan memperhatikan anggaran yang ada
71	Kabupaten Sumenep	#BP FASILITASI PENDAFTARAN MEREK PRODUK KOPERASI	Produk UKM banyak yang belum memperoleh legalitas merek dalam memasuki pangsa pasar yang lebih luas (50 merek)	Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD	diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi dan memperhatikan anggaran yang ada
72	Kabupaten Sumenep	#BP FASILITASI PENGUATAN JARINGAN PEMASARAN/KEMITRAAN PRODUK UKM	Banyaknya produk UMKM yang belum mendapatkan akses pasar dari pengusaha retail (100 UKM)	Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD	diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi dan memperhatikan anggaran yang ada
73	Kabupaten Sumenep	#BP PELATIHAN MANAJERIAL BAGI SDM UKM	Beberapa UKM membutuhkan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan manajerial (100 UKM)	Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD	diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi dan memperhatikan anggaran yang ada
81	Kabupaten Tuban	#BP FASILITASI SERTIFIKASI PRODUK KOPERASI	Produk koperasi yang belum standart nasional	Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD	diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi dan memperhatikan anggaran yang ada
82	Kabupaten Tuban	#BP FASILITASI PENDAFTARAN MEREK PRODUK UKM	Produk koperasi yang belum memiliki daya saing	Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD	diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi dan memperhatikan anggaran yang ada
83	Kabupaten Tuban	#BP PENDAMPINGAN AKSES PEMBIAYAAN FORMAL (PERBANKAN) BAGI UKM	masih banyaknya pelaku usaha mikro yang mengalami kesulitan untuk mengakses permodalan (perbankan)	Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD	diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi dan memperhatikan anggaran yang ada
84	Kabupaten Tuban	#BP FASILITASI PENDAFTARAN MEREK PRODUK UKM	Banyaknya produk UMKM yang belum memenuhi Standart Kualitas mutu Produk	Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD	diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi dan memperhatikan anggaran yang ada
85	Kabupaten Tuban	#BP FASILITASI PENDAFTARAN MEREK PRODUK UKM	Banyaknya Produk Usaha mikro yang belum terdaftar merk nya	Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD	diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi dan memperhatikan anggaran yang ada

No	KabupatenKota	Usulan	Permasalahan	Status Desk	Catatan Desk
86	Kabupaten Tulungagung	#BP Bimbingan Teknis Pengawasan Koperasi yang anggotanya lintas kabupaten / kota dalam satu provinsi	1. Masih banyaknya pengurus/pengelola koperasi yang masih belum memahami peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian 2. Masih banyaknya pengurus/pengelola koperasi yang masih belum memahami tentang manajemen akuntansi perkoperasian 3. Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa di Kab Tulungagung terlalu banyak, sehingga dalam 1 kegiatan belum dapat mengcover semua koperasi	Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD	diakomodir untuk difasilitasi apabila sesuai kewenangan dan ada ketersediaan anggaran
87	Kabupaten Tulungagung	#BP FASILITASI PENDAFTARAN MEREK PRODUK UKM	Masih banyaknya pelaku usaha koperasi dan usaha mikro yang belum memiliki merek dagang yang dipatenkan	Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD	diakomodir untuk difasilitasi apabila sesuai kewenangan dan ada ketersediaan anggaran
88	Kabupaten Tulungagung	#BP PENDAMPINGAN AKSES PEMBIAYAAN FORMAL (PERBANKAN) BAGI UKM	Masih minimnya pelaku usaha koperasi dan usaha mikro yang memerlukan akses pembiayaan untuk permodalan	Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD	diakomodir untuk difasilitasi apabila sesuai kewenangan dan ada ketersediaan anggaran. pembiayaan bisa diakses melalui sistem aplikasi e-financing SAPDA
89	Kabupaten Tulungagung	#BP FASILITASI PENGUATAN JARINGAN PEMASARAN/KEMITRAAN PRODUK UKM	Masih minimnya pengetahuan pelaku usaha Mikro cara memasarkan produknya	Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD	diakomodir untuk difasilitasi apabila sesuai kewenangan dan ada ketersediaan anggaran
90	Kabupaten Tulungagung	#BP PELATIHAN MANAJERIAL BAGI SDM UKM	Masih minimnya pengetahuan pelaku usaha mikro tentang mengelola usahanya dengan benar	Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD	diakomodir untuk difasilitasi apabila sesuai kewenangan dan ada ketersediaan anggaran. dapat juga diakses melalui aplikasi SIJAWARA
97	Kota Kediri	#BP PENDAMPINGAN AKSES PEMBIAYAAN FORMAL (PERBANKAN) BAGI UKM	perlu akses pembiayaan formal	Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD	diakomodir sebagai peserta dan menyesuaikan ketersediaan anggaran. akses pembiayaan/dagulir juga dapat diakses melalui aplikasi SAPDA
98	Kota Madiun	#BP PELATIHAN MANAJERIAL BAGI SDM UKM	Pengajuan Pelatihan Vokasional bagi Usaha Mikro di Kota Madiun, dengan nilai Rp. 90.000.000	Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD	diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi dan memperhatikan anggaran yang ada.

No	KabupatenKota	Usulan	Permasalahan	Status Desk	Catatan Desk
99	Kota Madiun	#BP FASILITASI SERTIFIKASI PRODUK KOPERASI	Pengajuan Bimtek Pengembangan Jenis Usaha Koperasi dan Digitalisasi Produk	Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD	isa diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi dan memperhatikan anggaran yang ada
105	Kota Probolinggo	#BP PELATIHAN MANAJERIAL BAGI SDM UKM	Masih kurangnya pelaku usaha yang memiliki ketrampilan manajerial untuk peningkatan usahanya (100 orang)	Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD	dapat diakomodir dengan sifat kepesertaan dan harus sesuai kewenangan provinsi serta memperhatikan ketersediaan anggaran
106	Kota Probolinggo	#BP PENDAMPINGAN AKSES PEMBIAYAAN FORMAL (PERBANKAN) BAGI UKM	Masih banyak pelaku usaha yang dianggap belum bankable dan terakses dengan pembiayaan formal (100 orang)	Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD	dapat diakomodir dengan sifat kepesertaan dan harus sesuai kewenangan provinsi serta memperhatikan ketersediaan anggaran
107	Kota Probolinggo	#BP Bimbingan Teknis Pengawasan Koperasi yang anggotanya lintas kabupaten / kota dalam satu provinsi	Masih belum optimalnya SDM Koperasi yang memahami teknis pengawasan koperasi (100 koperasi)	Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD	dapat diakomodir dengan sifat kepesertaan dan harus sesuai kewenangan provinsi serta memperhatikan ketersediaan anggaran
108	Kota Probolinggo	#BP FASILITASI PENDAFTARAN MEREK PRODUK UKM	Masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi produk untuk daya saing usaha (5 UKM)	Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD	dapat diakomodir dengan sifat kepesertaan dan harus sesuai kewenangan provinsi serta memperhatikan ketersediaan anggaran
109	Kota Probolinggo	#BP FASILITASI SERTIFIKASI PRODUK UKM	masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi Halal produk untuk daya saing usaha (5 UKM)	Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD	dapat diakomodir dengan sifat kepesertaan dan harus sesuai kewenangan provinsi serta memperhatikan ketersediaan anggaran



Tabel 2.6
Usulan kabupaten kota hasil pelaksanaan musrenbang RKPD
Tahun 2022 yang di tidak diakomodir

No	KabupatenKota	Usulan	Permasalahan	Status Desk	Catatan Desk
1	Kabupaten Ponorogo	#BP FASILITASI PENGUATAN JARINGAN PEMASARAN/KEMITRAAN PRODUK UKM	Belum terpenuhinya sarana prasarana aplikasi untuk pemasaran produk UMKM Rp. 500.000.000	Ditolak	bukan kewenangan provinsi
2	Kabupaten Ponorogo	#BP FASILITASI PENGUATAN JARINGAN PEMASARAN/KEMITRAAN PRODUK UKM	Belum tersedianya kawasan untuk PK5 Rp. 715.00.000	Ditolak	bukan kewenangan provinsi
3	Kota Malang	#BP PENDAMPINGAN AKSES PEMBIAYAAN FORMAL (PERBANKAN) BAGI UKM	Pengusaha di sektor UMKM membutuhkan bantuan modal sebagai sarana mengembangkan usahanya. Untuk itu dibutuhkan lembaga resmi pemberi pinjaman kepada para pengusaha tersebut.	Ditolak	bukan kewenangan provinsi.

Tabel 2.7
Dukungan perangkat daerah dalam pokok-pokok pikiran Dewan

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	TANGGAPAN/PENJELASAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
				DILAKSANAKAN PADA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH			
1	Mendorong penguatan basis ekonomi kerakyatan dan pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM), Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kehutanan harus tetap menjadi prioritas utama pembangunan ekonomi Jawa Timur;	Merupakan Prioritas Provinsi Jawa Timur pada RPJMD 2019-2024 pada nawa bhakti Jatim Berdaya	Dinas Koperasi dan UKM	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	3.181.500.000

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	TANGGAPAN/PENJELASAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
				DILAKSANAKAN PADA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH			
2	Melakukan agenda program dan kegiatan: (i) Peningkatan basis produksi UMKM dan Pesantren yang berjalan terpadu; (ii) memperkuat hubungan koperasi dan UMKM-Pesantren yang mandiri dan berdaya saing melalui mekanisme pembiayaan yang kompetitif, baik dalam skala <i>banking system</i> maupun yang <i>non bankable</i> ; (iii) memfasilitasi lahirnya generasi milenial di sektor koperasi dan UMKM serta penguatan peran Pesantren-pesantren di Jawa Timur; (iv) membuka trading house untuk Koperasi maupun Pesantren dan UMKM khususnya di sektor agrobisnis, pertanian, perikanan, pariwisata, perdagangan, industri kreatif; dan (v) bantuan permodalan, promosi produk, dan intervensi pembiayaan melalui mekanisme yang transparan dan peningkatan kualitas produksi.	Dukungan melalui Program Prioritas salah satunya One Pesantren One Product	Dinas Koperasi dan UKM	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	497.500.000
3	Mengurangi beban financial masyarakat, termasuk kredit UMKM kepada perbankan atau lembaga keuangan yang lain dengan skema pembebasan angsuran bunga dan pokok dalam beberapa bulan dan diganti dengan pembayaran biaya administrasi saja setiap bulannya. Hal ini harus dimotori oleh bank daerah Jawa Timur untuk masyarakat Jawa Timur.	Dukungan melalui fasilitasi pembiayaan	Dinas Koperasi dan UKM	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	614.484.000

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	TANGGAPAN/PENJELASAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
				DILAKSANAKAN PADA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH			
4	Konsep OPOP (One Pesantren One Produk) yang telah berjalan, tidak mampu mendorong berkembang dalam pemasaran serta tidak menjamin pesantren untuk memiliki produk yang berdaya saing kuat karna pendampingan mutu yang kurang. Maka skemanya harus dilakukan LINKAGE antara pesantren dengan perusahaan besar dalam memproduksi barang atau jasa serta memacu terciptanya produk produk baru yang berkualitas dan laku dipasaran	Dukungan melalui Program Prioritas salah satunya One Pesantren One Product	Dinas Koperasi dan UKM	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	497.500.000
5	Dalam rangka revitalisasi dan normalisasi perekonomian rakyat kecil di Jawa Timur, kami mengusulkan dilakukan penguatan sektor UMKM melalui optimalisasi Bank UMKM maupun Bank Jatim dalam pemberian dana pinjaman modal (<i>loan agreement</i>) bagi para pelaku UMKM di Jawa Timur.	Dukungan melalui fasilitasi pembiayaan dan pemberdayaan UMKM	Dinas Koperasi dan UKM	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	614.484.000
6	Mengingat jumlah pesantren di Jawa Timur berjumlah ribuan. maka ini potensi bagi pemerintah untuk diajak berkontribusi di Bidang pembangunan ekonomi kreatif yang tercentra di pesantren dengan melibatkan Kiai, santri, Alumni dan simpatisan. Pemerintah perlu Mendorong dan memfasilitasinya.	Melalui Program OPOP	Dinas Koperasi dan UKM	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	497.500.000

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah, selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah, dilakukan pula penelaahan terhadap kebijakan nasional.

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arah kebijakan pembangunan nasional telah diterjemahkan melalui Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yaitu Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang diarahkan pada delapan arah kebijakan yang meliputi :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim
2. Peningkatan kualitas SDM Kesehatan dan Pendidikan
3. Penanggulangan penanganan disertai peningkatan decent job
4. Mendorong pemulihan dunia usaha
5. Revitalisasi industry dan penguatan riset terapan
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim)
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Adapun terhadap urusan Koperasi dan UMKM masuk pada arah kebijakan keempat yaitu mendorong pemulihan dunia usaha yang dilakukan untuk revitalisasi pariwisata dan pengembangan UMKM yang ditandai dengan pencapaian :

- a. Pertumbuhan wirausaha sebesar 3,5%
- b. Pertumbuhan PDB pertanian sebesar 3,9 – 4,2%
- c. Nilai devisa pariwisata sebesar US\$ 1,76 – 6,06 Miliar

- d. Kontribusi PDB pariwisata sebesar 4,3%
- e. Nilai tambah ekonomi kreatif sebesar Rp 1.279 triliun

Sasaran dan prioritas penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 diselaraskan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden melalui lima arahan utama Presiden sebagai berikut :

1. Pembangunan sumber daya manusia, membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industry dan talenta global
2. Pembangunan infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan Kawasan produksi dengan Kawasan distribusi, mempermudah akses ke Kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat
3. Penyederhanaan regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan omnibus law, terutama menerbitkan Undang – Undang Cipta Kerja
4. Penyederhaan birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang Panjang dan menyederhanakan eselonisasi
5. Transformasi ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia

Dalam rangka mendukung arahan tersebut, diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
Koperasi dan UMKM masuk dalam agenda pembangunan ini yang diturunkan ke dalam Program prioritas **Penguatan kewirausahaan, UMKM, dan Koperasi** dengan Kegiatan prioritas :
 - a. Peningkatan kemitraan usaha antara Usaha mikro kecil dan Usaha menengah besar
 - b. Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha

- c. Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi, dan peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan dan transformasi pelayanan public

Berikut merupakan turunan target kinerja Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasar hasil Rakortekrenbang Tahun 2023 sebagai berikut :

Kinerja	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
Mewujudkan Koperasi yang Berkualitas dan Modern	000 - Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Indeks Kepuasan Pelayanan Izin USP dan Izin Pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas USP
		2.17.02.1.01 - Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah penerbitan izin USP - Koperasi
		2.17.02.1.01.01 - Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam
		2.17.02.1.02 - Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam koperasi

Kinerja	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
		2.17.02.1.02.01 - Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
		2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Berkualitas
		2.17.03.1.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase pemeriksaan dan pengawasan koperasi
		2.17.03.1.01.01 - Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat
		2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi sehat
		2.17.04.1.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya
		2.17.04.1.01.01 - Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi
Mewujudkan UMKM dan Wirausaha Naik Kelas yang mampu Berdaya Saing di Pasar Domestik dan Global	002 - Meningkatnya Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal 003 - Terasilitasinya UKM yang Berpotensi Masuk ke Dalam Rantai Pasok dan Ekspor	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang telah diberdayakan dan dilindungi
		2.17.06.1.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan
			Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan
			Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan usaha
			Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran
		2.17.06.1.01.01 - Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha

Kinerja	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
		2.17.06.1.01.02 - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
	002 - Meningkatnya Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	2.17.07 - PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UKM yang telah diberdayakan
		2.17.07.1.01 - Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UKM yang diberi dukungan fasilitasi legalitas kelembagaan
			Jumlah UKM yang diberi dukungan fasilitasi pembiayaan
			Jumlah UKM yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran
			Jumlah UKM yang diberikan dukungan fasilitasi penguatan usaha
		2.17.07.1.01.01 - Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
	004 - Pertumbuhan Wirausaha	2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UKM yang telah dikembangkan
		2.17.08.1.01 - Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UKM yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan SDM
			Jumlah UKM yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha
		2.17.08.1.01.01 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi
		2.17.08.1.01.02 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mengacu pada tujuan dan sasaran target kinerja Rencana Strategis Perubahan Tahun 2019-2024. Berikut merupakan target tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur tahun 2023 :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

Misi (RPJMD Th 2019 – 2024)	Tujuan			Sasaran		
	Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Target
Mewujudkan Keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor, dan keterhubungan wilayah	Meningkatnya PDRB Koperasi dan UMKM di Jawa Timur	Pertumbuhan PDRB KUMKM Jawa Timur (%)	2,50%	Meningkatnya Nilai Tambah Bruto K-UKM Binaan	Nilai Tambah Bruto KUMK Binaan (Rp)	3,8 T
				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	82,71

Sumber : Renstra Perubahan Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024

Tujuan yang ditetapkan yaitu Meningkatkan PDRB Koperasi dan UMKM di Jawa Timur dengan indikator Pertumbuhan PDRB KUMKM Jawa Timur yang dihitung dengan formula $(\text{PDRB KUMKM Jatim Tahun } n - \text{PDRB KUMKM Jatim tahun } (n-1)) \text{ dibagi PDRB KUMKM Jatim th. } (n-1) \times 100\%$ dengan catatan nilai PDRB yang digunakan adalah nilai Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Indikator tujuan tersebut menjadi indikator kinerja daerah urusan Koperasi dan UMKM yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2019 – 2024.

Dengan memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM, maka ditetapkan dua sasaran yang ingin dicapai yaitu Meningkatkan Nilai Tambah Bruto K-UKM dan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Sasaran pertama Meningkatkan Nilai Tambah Bruto K-UKM merepresentasikan kinerja sesuai tugas dan fungsi dalam melaksanakan urusan Koperasi dan UKM dengan indikator Perkembangan Nilai tambah bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) yang nilainya diperoleh dari hasil survei terhadap Koperasi dan UKM Binaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur.

Pandemi covid 19 menyebabkan terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur sehingga menyebabkan perubahan asumsi dalam penghitungan proyeksi persentase pertumbuhan PDRB (Nilai tambah bruto) yang dihasilkan oleh

koperasi dan UMKM di Jawa Timur. Perubahan target dengan asumsi bahwa pemulihan ekonomi sebagai akibat dampak pandemi Covid - 19 berlangsung hingga tahun 2024. Perubahan tahun 2020 merupakan angka sementara hasil penghitungan survei nilai tambah bruto Koperasi dan UMKM di Jawa Timur

Sedangkan sasaran kedua yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah merepresentasikan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi dengan indikator Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang didasarkan pada hasil penilaian SAKIP yang terdiri dari aspek perencanaan sebesar 30 persen, pengukuran kinerja 25 persen, pelaporan kinerja 15 persen, evaluasi internal 10 persen, dan capaian kinerja sebesar 20 persen. Perubahan target nilai evaluasi implementasi SAKIP tahun 2021 – 2024 berdasar pada capaian tahun 2020 yang telah melampaui target, sehingga dinilai perlu untuk dilakukan penyesuaian pada target di tahun – tahun selanjutnya. Kedua indikator sasaran tersebut selanjutnya disebut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasar pada Rencana Strategis Perubahan tahun 2019 - 2024, Terdapat Tujuh Program Pembangunan dan Satu Program Rutin, dengan masing – masing terdapat Enam kegiatan di dalamnya. Ketujuh Program Pembangunan tersebut yaitu:

- 1) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam dengan sasaran program untuk Melakukan Fasilitasi pengajuan izin usaha simpan pinjam Koperasi
- 2) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan sasaran program untuk Melakukan Pengawasan atas kelembagaan dan kegiatan usaha Koperasi
- 3) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi dengan sasaran program untuk Melakukan pengawasan atas kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam / Usaha Simpan Pinjam Koperasi

- 4) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan sasaran program untuk Meningkatkan kualitas SDM Koperasi dan UKM melalui pelatihan
- 5) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan sasaran program untuk Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan pada aspek kelembagaan Koperasi serta meningkatkan kualitas produk dan usaha koperasi, perluasan akses pembiayaan bagi koperasi, serta perluasan akses pemasaran produk koperasi
- 6) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) dengan sasaran program untuk Meningkatkan pemberdayaan UKM pada aspek kelembagaan, produksi, perluasan akses pembiayaan, dan perluasan akses pasar produk UKM
- 7) Program Pengembangan UMKM dengan sasaran program untuk Meningkatkan kualitas produk UKM serta peningkatan kualitas pemasaran produk UKM.

Sedangkan Satu Program Rutin yang bersifat Kesekretariatan yaitu Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Di dalamnya terdapat enam kegiatan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah serta Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.17.0.00.0.00.01.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah										
21702	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		1 Indeks Kepuasan Pelayanan Izin USP dan Izin Pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas USP	Jawa Timur	Persen	87	800.000.000	PAD dan Block Grant Rokok			
21702101	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		1 Jumlah penerbitan izin USP - Koperasi	Jawa Timur	Unit	35	400.000.000	PAD dan Block Grant Rokok		88	1.236.340.000
2170210101	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Jawa Timur	Unit Usaha	20	400.000.000	PAD dan Block Grant Rokok		40	618.170.000
21702102	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		1 Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam koperasi	Jawa Timur	Persen	100	400.000.000	PAD dan Block Grant Rokok		180	618.170.000
2170210201	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Pembukaan Kantor CabangCabang Pembantu dan Kantor Kas KoperasSimpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jawa Timur	Unit Usaha	25	400.000.000	PAD dan Block Grant Rokok		330	618.170.000
21703	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		1 Persentase Koperasi yang Berkualitas	Jawa Timur	Persen	63	1.103.993.480	PAD dan Block Grant		64%	1.000.970.000
21703101	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		1 Persentase pemeriksaan danpengawasan koperasi	Jawa Timur	Persen	45	1.103.993.480	PAD dan Block Grant Rokok		46%	1.000.970.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2170310101	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Meningkatnya Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	1 Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat	Jawa Timur	Dokumen	56	1.103.993.480	PAD dan Block Grant Rokok		320	1.000.970.000
21704	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		1 Persentase koperasi sehat	Jawa Timur	Persen	22	609.437.520	PAD dan Block Grant Rokok		23%	769.590.000
21704101	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		1 Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya	Jawa Timur	Persen	27	609.437.520	PAD dan Block Grant Rokok		30%	769.590.000
2170410101	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Terlaksananya Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	1 Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jawa Timur	Unit Usaha	25	609.437.520	PAD dan Block Grant Rokok		135	769.590.000
21705	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		1 Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan	Jawa Timur	Persen	96	1.016.000.000	PAD dan Block Grant Rokok DAK Non Fisik		97	677.239.200
21705101	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		1 Persentase jumlah pengelola koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian	Jawa Timur	Persen	32	1.016.000.000	PAD dan Block Grant Rokok		33,00%	677.239.200
2170510101	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	1 Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Jawa Timur	Orang	500	1.016.000.000	PAD dan Block Grant Rokok		215	677.239.200
21706	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		1 Persentase Koperasi yang telah diberdayakan dan dilindungi	Jawa Timur	Persen	69	13.537.121.850	PAD dan Block Grant Rokok	Termasuk anggaran hibah untuk Koperasi	70	22.861.350.000
21706101	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		1 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	Jawa Timur	Persen	30		PAD dan Block Grant Rokok		30	22.861.350.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			2 Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Jawa Timur	Persen	24				46%	
			3 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan	Jawa Timur	Persen	44				32%	
			4 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan usaha	Jawa Timur	Persen	31				46%	
2170610101	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Terwujudnya Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	1 Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standarisasi dan Restrukturisasi Ysaha	Jawa Timur	Unit Usaha	300	1.100.000.000	PAD dan Block Grant Rokok		90	17.273.020.000
2170610102	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	1 Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jawa Timur	Unit Usaha	1.333	12.437.121.850	PAD dan Block Grant Rokok		180	
21707	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		1 Persentase UKM yang telah diberdayakan	Jawa Timur	Persen	33	39.030.838.400	PAD dan Block Grant Rokok	Termasuk anggaran hibah untuk kelompok masyarakat	34	19.928.180.000
21707101	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		1 Jumlah UKM yang diberi dukungan fasilitasi legalitas kelembagaan	Jawa Timur	Unit	75	39.030.838.400	PAD dan Block Grant Rokok			
			2 Jumlah UKM yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Jawa Timur	Unit	350				100	19.928.180.000
			3 Jumlah UKM yang diberi dukungan fasilitasi pembiayaan	Jawa Timur	Unit	720				375	
			4 Jumlah UKM yang diberikan dukungan fasilitasi penguatan usaha	Jawa Timur	Unit	350				725	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2170710101	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Berkembangnya UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	1 Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jawa Timur	Unit Usaha	2240	39.030.838.400	PAD dan Block Grant Rokok		375	
2170710102	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	1 Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Jawa Timur	Orang	-	-	DAK Non Fisik		-	-
21708	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		1 Persentase UKM yang telah dikembangkan	Jawa Timur	Persen	33	4.991.095.750	PAD dan Block Grant Rokok		34	6.401.178.000
21708101	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		1 Jumlah UKM yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Jawa Timur	Unit	150	4.991.095.750	PAD dan Block Grant Rokok		150	6.401.178.000
			2 Jumlah UKM yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan SDM	Jawa Timur	Unit	250				250	
			3 Jumlah UKM yang bermitra	Jawa Timur	Unit	75				80	
2170810101	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1 Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jawa Timur	Unit Usaha	620	4.763.603.000	PAD dan Block Grant Rokok		600	6.401.178.000
2170810102	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan literasi hukum dan bantuan penyelesaian perkara bagi pelaku UMKM	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan literasi hukum dan bantuan penyelesaian perkara bagi pelaku UMKM	1 Jumlah pelaku UMKM yang memahami literasi hukum	Jawa Timur	Orang	250	227.492.750	PAD DAK Non Fisik			
XXX01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		1 Persentase indikator program yang tercapai	Jawa Timur	persen	100	38.697.846.996	PAD		100	39.167.286.800

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
				Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
			2	Persentase realisasi anggaran	Jawa Timur	persen	100				100	
			3	Indeks profesionalitas ASN	Jawa Timur	persen	74				75	
XXX01101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	Jawa Timur	Dokumen	4	1.677.154.768	PAD		4	1.540.267.000
			2	Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	Jawa Timur	Dokumen	4					
XXX0110101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jawa Timur	Dokumen	4	716.745.022	PAD		5	714.000.000
XXX0110102	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	1	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jawa Timur	Dokumen	1	7.563.442	PAD		1	12.108.000
XXX0110103	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jawa Timur	Dokumen	1	7.563.442	PAD		1	8.619.000
XXX0110104	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	1	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jawa Timur	Dokumen	1	4.063.442	PAD		1	6.156.000
XXX0110105	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jawa Timur	Dokumen	1	4.063.442	PAD		1	6.156.000
XXX0110106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jawa Timur	laporan	5	908.254.978	PAD		5	755.000.000
XXX0110107	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jawa Timur	laporan	3	28.901.000	PAD		3	38.228.000
XXX01102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Jawa Timur	laporan	1	26.668.867.732	PAD		1	29.551.326.000
XXX0110201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jawa Timur	Orang / Bulan	1	25.504.748.000	PAD		12	28.360.360.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
XXX0110202	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jawa Timur	Dokumen	12	522.288.000	PAD		12	607.000.000
XXX0110203	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jawa Timur	Dokumen	12	561.572.001	PAD		12	534.186.000
XXX0110204	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jawa Timur	Dokumen	12	7.509.478	PAD		12	12.192.000
XXX0110205	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jawa Timur	Laporan	1	7.022.223	PAD		1	3.048.000
XXX0110206	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jawa Timur	Dokumen	1	44.327.145	PAD		1	17.825.000
XXX0110207	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jawa Timur	Laporan	12	17.201.846	PAD		12	13.615.000
XXX0110208	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jawa Timur	Dokumen	1	4.199.039	PAD		1	3.100.000
XXX01105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1 Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Jawa Timur	Dokumen	2	1.560.831.096	PAD		2	1,806,548,000
XXX0110501	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jawa Timur	Unit	1	182.548.585	PAD		1	129,924,000
XXX0110502	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jawa Timur	Paket	1	260.069.996	PAD		2	188,900,000
XXX0110503	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jawa Timur	Dokumen	2	970.501.600	PAD		1	1,125,000,000
XXX0110504	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jawa Timur	Dokumen	1	650.000.000	PAD			88,724,000
XXX0110509	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jawa Timur	Orang	210	346.259.500	PAD		210	274,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
XXX01106	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1 Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Jawa Timur	dokumen	2	2.481.182.218	PAD		2	1.130.578.000
XXX0110601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jawa Timur	Paket	1	26.137.095	PAD		1	27.352.000
XXX0110602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jawa Timur	Paket	4	621.062.464	PAD		2	298.782.000
XXX0110603	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jawa Timur	Paket	2	53.987.999	PAD		1	27.430.000
XXX0110605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jawa Timur	Paket	1	224.289.400	PAD		1	193.000.000
XXX0110606	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jawa Timur	dokumen	1	15.264.600	PAD		1	20.120.000
XXX0110607	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	1 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jawa Timur	Paket	2	59.877.250	PAD		1	7.798.000
XXX0110608	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jawa Timur	Laporan	2	177.099.500	PAD		1	83.276.000
XXX0110609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jawa Timur	Laporan	4	1.676.361.245	PAD		1	472.820.000
XXX01108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jawa Timur	Dokumen	1	1.814.155.186	PAD		1	4.057.067.800
XXX0110801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jawa Timur	Paket	1	10.000.000	PAD		1	10,465.000
XXX0110802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jawa Timur	Laporan	12	1.064.505.146	PAD		12	1.282.000.000
XXX0110803	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jawa Timur	Laporan	2	108.951.000	PAD		1	72.140.000
XXX0110804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jawa Timur	Laporan	4	2.599.574.120	PAD		2	2.692.462.800
XXX01109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	Jawa Timur	dokumen	1	678.325.000	PAD		2	1.081.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
				Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
XXX0110901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jawa Timur	Unit	7	217.100.000	PAD		1	190.500.000
XXX0110902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jawa Timur	Unit	8	289.569.000	PAD		2	274.000.000
XXX0110906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jawa Timur	Unit	9	253.675.000	PAD		2	187.000.000
XXX0110909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jawa Timur	Unit	2	284.921.000	PAD			
TOTAL					99.526.264.000						92.042.134.000	

2 430.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2023 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi Jawa Timur Perubahan Tahun 2019-2024 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur dalam mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi Jawa Timur Perubahan Tahun 2019-2024 yaitu mendukung terwujudnya capaian pada Misi pertama yaitu Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor, dan keterhubungan wilayah.

4.1 PRIORITAS PERANGKAT DAERAH YANG MENDUKUNG PRIORITAS PROVINSI

Prioritas perangkat daerah yang mendukung prioritas provinsi adalah sebagai berikut :

Table 4.1 Program Kegiatan Yang Mendukung Program Prioritas Provinsi Dan Program Icon Gubernur Tahun 2023

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM ICON/ PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	NAWA BHA KTI	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	SUMBER PENDANAAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder	Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi	Millenial Job Center	Bhakti 2 - Jatim Kerja	- Fasilitasi foto produk dan kualitas kemasan - Fasilitasi katalog digital - Peningkatan kualitas kewirausahaan talenta	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	PAD Block grant Pajak	2.343.310.000
			Communal Branding	Bhakti 7 - Jatim Berdaya	Fasilitasi merek produk KUKM	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	PAD Block grant Pajak	780.760.000
			One Pesantren One Product	Bhakti 7 - Jatim Berdaya	Penguatan kelembagaan Koperasi pondok pesantren (Koppontren)	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	PAD Block grant Pajak	7.807.690.000
				Bhakti 7 - Jatim Berdaya	Pelatihan Kompetensi SDM Pengelola Koppontren	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	PAD Block grant Pajak	
				Bhakti 7 - Jatim Berdaya	- Sertifikasi produk koppontren dan alumni pesantren -Fasilitasi merek produk koppontren dan alumni pesantren	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	PAD Block grant Pajak	

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM ICON/ PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	NAWA BHAKTI	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	SUMBER PENDANAAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
							dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
				Bhakti 7 - Jatim Berdaya	- Perluasan akses pembiayaan untuk Kopontren - Perluasan akses pemasaran produk kopontren dan alumni pesantren	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	PAD Block grant Pajak	
			Revitalisasi Koperasi	Bhakti 7 - Jatim Berdaya	Restrukturisasi usaha Koperasi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	PAD Block grant Pajak	1.171.160.000
				Bhakti 7 - Jatim Berdaya	Restrukturisasi usaha Koperasi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	PAD Block grant Pajak	
				Bhakti 7 - Jatim Berdaya	Pengawasan Koperasi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesiambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada	PAD Block grant Pajak	

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM ICON/ PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	NAWA BHAKTI	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	SUMBER PENDANAAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
								Anggota dan Masyarakat		
			Kemitraan UKM dan BUMDesa	Bhakti 7 - Jatim Berdaya	Kemitraan pembiayaan UKM dan BUMDesa	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	PAD Block grant Pajak	78.070.000

4.2 PRIORITAS PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur juga merencanakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan prioritas perangkat daerah yang tidak mendukung Prioritas Provinsi namun mendukung tercapainya indikator tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tabel 4.2 Prioritas Perangkat Daerah Yang Mendukung Prioritas Provinsi

URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	SUMBER PENDANAAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
Subsidi Program Prokesra melalui Bank UMKM Jatim	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	PAD	20.000.000.000
Pemberdayaan UKM Dekranasda	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	PAD	1.750.000.000
Promosi Produk UKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	PAD	1.000.000.000
Pelatihan dan Inkubator Bisnis	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	PAD	750.000.000
Pendampingan akses permodalan bagi Koperasi	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	PAD	500.000.000
Pelatihan Kompetensi SDM UKM	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	PAD	1.000.000.000
Peningkatan kualitas Produk melalui Standardisasi produk UKM	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	PAD	800.000.000

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja (renja) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja Tahun 2023 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Renja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1 KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis perangkat daerah (Renstra) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan fungsinya serta menjaga konsistensi antara RKPD, Renja, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;

2. Komitmen tersebut selanjutnya diharapkan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang akan ditandatangani di awal tahun, baik di tingkat Eselon II, III, IV, dan Staf.
3. Akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2022 untuk mendukung efektivitas pelaksanaannya.

5.2 RENCANA TINDAK LANJUT

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2023, selanjutnya Renja Tahun 2023 akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



**DISKOP
UKM**
PROV JATIM

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TIMUR**